



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RUANG PENGALAMAN DALAM PENDIDIKAN:  
TELAAH ATAS PRAKTIK PENYELENGGARAAN UN MENURUT FILSAFAT  
PENDIDIKAN DEMOKRATIS JOHN DEWEY**

**SKRIPSI**

**ARIANE MEIDA**

**0606091350**

**Dengan ini menyatakan bahwa isi TA CD-ROM sama dengan *hardcopy***

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI FILSAFAT  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**RUANG PENGALAMAN DALAM PENDIDIKAN:  
TELAAH ATAS PRAKTIK PENYELENGGARAAN UJIAN  
NASIONAL MENURUT FILSAFAT PENDIDIKAN  
DEMOKRATIS JOHN DEWEY**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

**ARIANE MEIDA**

**NPM. 0606091350**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT  
DEPOK  
JULI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 2 Juli 2012

*Ariane Meida*  
Ariane Meida

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,**

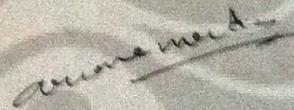
**dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk**

**telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ariane Meida**

**NPM : 0606091350**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 2 Juli 2012**

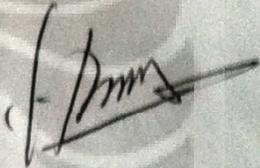
## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :  
Nama : Ariane Meida  
NPM : 0606091350  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Ruang Pengalaman dalam Pendidikan : Telaah  
atas Praktik Penyelenggaraan Ujian Nasional  
Menurut Filsafat Pendidikan Demokratis John  
Dewey

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mohamad Fuad Abdillah

()

Penguji : Ganang Dwi Kartika, M.Hum

()

Penguji : Dr. Naupal

()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

Ditet

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga awal pertengahan tahun 2012 akhirnya menjadi ujung perjalanan skripsi yang telah dimulai sejak awal tahun 2010 ini; yang juga berarti akhir dari masa studi saya sebagai Mahasiswa Filsafat. Sepanjang empat tahun masa kuliah dan dua tahun masa pengerjaan skripsi, bertaburlah dukungan, nasihat, dan bimbingan dari keluarga, pengajar, dan teman-teman. Oleh karena itu saya akan menghaturkan ucapan terimakasih, meskipun hal tersebut tak selayaknya saya anggap cukup sebagai balasan budi baik keluarga, pengajar, dan teman-teman sekalian.

Terimakasih kepada kedua orangtua, Nur Arif dan Bambang Sudirman yang telah memberikan dukungan moril dan materil. Serta kepada kakak dan adik-adik saya, Hidayanta, Oky, dan Ibnu.

Kepada Bapak Fuad saya ucapkan terimakasih atas kesabarannya membimbing saya selama dua tahun masa pengerjaan skripsi ini. Juga kepada Bapak Ganang dan Bapak Naupal yang telah menjadi penguji dan memberi banyak kritik dan saran yang berguna. Kepada Mba Yayas selaku Ketua Jurusan yang dengan lembut terus mendorong saya dan teman-teman Filsafat angkatan 2006 untuk berkonsentrasi menyelesaikan skripsi. Teristimewa kepada Kakak Upie selaku dosen, senior, dan teman yang baik.

Terimakasih sedalam-dalamnya juga saya ucapkan kepada Mas Yudhi Soenarto atas pengajaran “ekstrakurikuler-nya” yang sangat berharga di Teater Sastra. Juga kepada teman-teman Teater Sastra, Teater Agora, keluarga besar Mapala UI, Tim Arung Jeram Putri Jambi-Jepang, teman Gudang, Parspala, “anak-anak” Payung dan Kansas, tim Ngamen Kansas, teman-teman Filsafat dari berbagai angkatan, KAPENA, Pondok Sakura, Pondok Ginta, serta The BobRocks. Kebersamaan dengan kalian sungguh suatu pengalaman dan pembelajaran yang berharga.

Serta untuk Adi Ahdiat dengan berjuta alasan untuk berterimakasih kepadanya, terutama karena telah memberi asupan penuh gizi kepada jiwa muda saya dan teman-teman muda lainnya.

Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat.

Depok, 12 Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariane Meida  
NPM : 0606091350  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Departemen : Ilmu Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

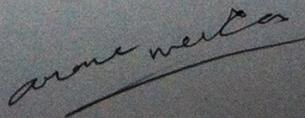
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Metafora sebagai Pembacaan Dekonstruktif terhadap Dekonstruksi Derrida*, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Ariane Meida)

vi

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Ariane Meida  
Program Studi : Ilmu Filsafat  
Judul : Ruang Pengalaman dalam Pendidikan : Telaah atas Praktik Penyelenggaraan Ujian Nasional Menurut Filsafat Pendidikan Demokratis John Dewey

Pendidikan merupakan media penciptaan dan pengolahan pengalaman yang terawasi, terencana, dan sistematis. Titik tolak dan tujuan dari pendidikan adalah pengembangan pengalaman secara berkelanjutan. Pengalaman adalah segala situasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkan individu pada upaya kritis refleksif. Metode pencapaian pengetahuan lalu tidak didasarkan pada satu pendasaran epistemologi tertentu yang dianggap valid, namun mengacu pada pengalaman tiap individu yang secara alamiah bersifat kontingen. Ini merupakan konsepsi pendidikan Demokratis. Penyelenggaraan UN tidak membuka ruang bagi pengalaman yang menjadi titik tolak dan tujuan dalam konsepsi pendidikan demokratis karena membakukan epistemologi positivistik sebagai satu-satunya metode pencapaian pengetahuan yang dianggap valid.

Kata kunci : Pendidikan, pengalaman, Ujian Nasional

## ABSTRACT

Nama : Ariane Meida  
Study Program: Philoshopy  
Judul : Experience sphere in Education : Study of Practical  
Implementation of *Ujian Nasional* According to John Dewey  
Philosophical Democratic of Education

Education is a media creation and experience cultivation that observed, planned, and sistematic. The basic and purpose of education are developing experience in continuity. Experience is a condition which is embraced in action and to direct individu on critical reflecton efforts. Then, the method of attaining knowledge isn't based on one certain valid basic epistemologic, but reference on individual experience which is naturally contingent. This is a conception of Democratic education. The implementation of *Ujian Nasional* (UN) didn't open a space for experience that stands for the basic and purpose on conception of democratic education, because it's blocked the positivistic's epistemology as the only method to attain a valid knowledge.

Key words: Education, experience, *Ujian Nasional*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan penulisan .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori .....	7
1.6. Pernyataan Tesis .....	10
1.7. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 FILSAFAT PENDIDIKAN DEMOKRATIS JOHN DEWEY</b> .....	12
2.1. Sosok Intelektual John Dewey .....	14
2.2. Pragmatisme .....	17
2.3. Pragmatisme sebagai Kerangka Berpikir .....	19
2.4. Konsepsi Pendidikan Demokratis John Dewey .....	20
2.4.1. Fungsi Pendidikan Demokratis .....	22
2.4.2. Tujuan Pendidikan Demokratis .....	23
2.4.3. Metode Pendidikan Demokratis .....	25
2.4.4. Kurikulum Pendidikan Demokratis .....	29
<b>BAB 3 PENGALAMAN SEBAGAI ASPEK PENDIDIKAN DEMOKRATIS</b> .....	32
3.1. Pengertian dan Aspek Pembentuk Pengalaman .....	32
3.2. Prinsip-prinsip Pengalaman .....	35
3.3. Pengalaman sebagai Naturalisasi Epistemologi .....	41
<b>BAB 4 KAJIAN METAFORA DALAM TEKS FILSAFAT</b> .....	44
4.1. Analisis Praktek Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia .....	47
4.2. Wacana Positivisme dalam Penyelenggaraan UN .....	48
4.2.1 Asumsi Kebenaran Korespondensial dan Universal .....	49
4.2.2 Konstruksi Realitas dalam Narasi Positivistik .....	52
4.2.3 Komunikasi Pengetahuan melalui Bahasa Universal .....	52
4.3. Absolutisme Epistemologis dalam Wacana Positivisme .....	54

**BAB 5 PENUTUP** ..... 59  
    5.1. Kesimpulan ..... 59  
    5.2. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 67



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional menimbang bahwa salah satu amanat yang diemban oleh pemerintahan Negara berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Upaya *mencerdaskan kehidupan bangsa* ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta pencapaian akhlak mulia. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional merupakan penyelenggaraan suatu sistem yang menentukan landasan, proses, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional ini menimbang bahwa sistem ini harus mampu menjamin peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dengan melakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dapat mencetak lulusan pendidikan yang siap menghadapi tantangan yang muncul dari kehidupan bermasyarakat dari tataran lokal hingga global.

Berdasarkan Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menetapkan standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab IX pasal 35 ayat 1, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Penetapan standar penyelenggaraan pendidikan ini berkaitan dengan diselenggarakannya muatan

kurikulum yang desentralistik<sup>1</sup>. Penyelenggaraan kurikulum yang tak lagi sentralistik dikontrol melalui serangkaian ketetapan standar. Anak didik, sekolah, dan pemerintah daerah yang otonom, diharapkan mampu berkerja sama dalam menciptakan dan menjalankan suatu sistem pendidikan yang memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan oleh negara. Ujian Nasional (UN), pada akhirnya dilaksanakan dalam rangka menguji standar perkembangan diri peserta didik dan kelayakan edukasional setiap sekolah dalam skala nasional.

UN merupakan ujian akhir yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik sebagai syarat kelulusan jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA. Kriteria kelulusannya berupa minimal *passing grade* yang ditetapkan langsung oleh negara. Peserta didik yang tidak lulus tidak akan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketidaklulusan tersebut diasumsikan oleh sistem pendidikan sebagai bukti kegagalan peserta didik dalam memanfaatkan masa belajarnya dengan baik. Bukan hanya itu, sekolah dengan angka kelulusan yang rendah pun diasumsikan telah gagal dalam mencapai standar pengajaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, hal ini mengarahkan sekolah dan peserta didik untuk memfokuskan diri pada pencapaian nilai minimal yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan. Yaitu dengan menambah porsi waktu pengajaran pada bidang-bidang yang diujikan dan memfokuskan satu tahun terakhir masa belajar dengan pelatihan dan pengulangan model soal yang akan diujikan.

Penyelenggaran UN, alih-alih berperan dalam memajukan mutu pendidikan, ternyata malah memperlihatkan kerusakan sistem pendidikan di Indonesia. Pasalnya, muatan soal dalam UN adalah muatan persoalan yang tak memiliki relevansi dengan realitas sosial yang tengah terjadi. Misalnya soal dalam ujian mata pelajaran bahasa indonesia tidaklah mencakup pula pengujian atas pemahaman struktur dan kepentingan bahasa, namun sebatas pengujian daya hapal atas gramatika yang telah diajarkan. Selain itu, model

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan pusat kewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan.

soal dalam UN selalu berupa pilhan ganda yang hanya menyediakan satu jawaban yang dianggap benar. Muatan dan model soal macam ini menutup kemungkinan bagi berkembangnya daya kritis, kreatif, alternatif, karena peserta didik hanya disodorkan kebenaran yang bersifat tunggal —dan akhirnya tidak mengarahkan mereka untuk mampu memecahkan problem sosial yang tengah terjadi. Standar kuantitatif yang diberlakukan dalam UN sebagai syarat kelulusan juga menjadi determinasi atas kriteria perkembangan diri peserta didik, yang nyatanya memiliki keragaman latar belakang dan keunikan tersendiri.

UN merupakan representasi dari pelaksanaan sistem pendidikan yang berlandaskan paradigma positivistik. Positivisme melakukan pemisahan tegas antara fakta dengan nilai dalam upaya mendapatkan pemahaman objektif mengenai realitas sosial (Fakih, 2000, p.28). Pemisahan ini mengandaikan bahwa permasalahan sosial akan selesai melalui upaya penajaman penalaran objektif tiap individu dalam masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa konsep dan metode ilmu pengetahuan alam dapat pula menjelaskan persoalan kehidupan kolektif manusia yang pada mulanya dicetuskan oleh Auguste Comte. Ketika konsep dan metode ilmu alam —yang menyatakan bahwa segala peristiwa memiliki hukum kausa sebab-akibat yang alami dan berlaku universal— diaplikasikan pula untuk mencapai pengetahuan tentang manusia, maka yang terbentuk adalah pemahaman bahwa persoalan kehidupan manusia baik secara individual dan kolektif adalah selalu terlepas dari kehendak-kehendak subjektif.

Konsekuensi dari pendidikan yang mengacu pada paham positivistik adalah; penekanan pendekatan yang objektif dan bebas nilai. Penekanan ini menuntut bahan ajar yang dijauhkan relasinya dengan realitas sosial yang tengah berlangsung —karena pendekatan bahan ajar dengan realitas sosial hanya akan membawa pada pengetahuan yang bersifat parsial, dan itu tidak ilmiah. Kriteria objektif dan bebas nilai merupakan bentuk determinasi cara pandang atas berbagai fenomena. Cara pandang yang deterministik ini pada akhirnya memungkinkan paham positivistik untuk melakukan generalisasi dan universalisasi atas segala fenomena. Pengukuran terhadap perkembangan diri

anak didik pun dibersihkan dari penilaian-penilaian subjektif agar didapatkan kriteria yang universal; yaitu melalui penilaian kuantitatif.

John Dewey, seorang pemikir berkebangsaan Amerika yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, menuturkan bahwa proses perkembangan diri anak didik merupakan proses pengolahan pengalaman agar menuju pada puncak-puncak potensi kediriannya. Lebih lanjut Dewey menuturkan, pengalaman individual yang merupakan dialog antara diri dan lingkungan akan membentuk minat dan potensi kedirian anak didik. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa ukuran pencapaian perkembangan diri anak didik yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan secara tunggal.

Penetapan kriteria tunggal hanya akan menekan dan menyia-nyiaikan potensi kedirian yang beragam. Penetapan kriteria tunggal merupakan dampak dari dibakukannya kerangka epistemologis dalam landasan penyelenggaraan pendidikan. Pembakuan ini menolak menjadikan pengalaman individual sebagai landasan dalam penentuan substansi dan metode penyelenggaraan pendidikan. Padahal, pengolahan pengalaman individual ini akan membentuk karakter kebudayaan yang menerima dan menghargai perbedaan yang diperlukan demi mewujudkan kondisi masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Proses pendidikan dimaknai Dewey sebagai proses pengorganisasi dan perekonstruksi pengalaman individu secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memberi makna kedalam pengalaman. Pemaknaan ini akan sekaligus memberi peningkatan pada kemampuan individu untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam menghadapi pengalaman berikutnya. Peningkatan ini akan sekaligus meningkatkan kemampuan memberi makna yang lebih kedalam pengalaman.

Prinsip-prinsip mengenai pengalaman yang memiliki nilai pendidikan dibutuhkan agar pengalaman dapat ditempatkan sebagai basis dari penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman yang berkelanjutan adalah konsep dasar yang merangkum prinsip pengalaman yang memiliki nilai pendidikan. Pengalaman yang berkelanjutan adalah pengalaman yang menciptakan kondisi

pembelajaran lebih lanjut serta membuka peluang bagi terciptanya pengalaman-pengalaman lain. Perbedaan budaya dan kewilayahan berdampak pada pengalaman individual yang berbeda pula. Oleh karena itu, kemauan dan kemampuan untuk saling membagi hasil pemaknaan atas pengalaman dibutuhkan agar setiap kelompok sosial memiliki peluang untuk berkonflik dalam penentuan prinsip kebaikan bersama.

Dengan demikian, pendidikan yang dalam penyelenggaraannya menjadikan pengalaman sebagai basis utama, tak dapat membakukan satu kajian epistemologis sebagai landasan kebenarannya. Karena pembakuan landasan cara memperoleh pengetahuan —seperti yang dilakukan pendidikan industrial yang bercorak positivistik— akan menolak keterbukaan komunikasi mengenai landasan kebenaran yang diupayakan terjalin dalam masyarakat demokratis. Permasalahan mengenai pembakuan epistemologis dalam penyelenggaraan pendidikan inilah yang akan menjadi fokus bahasan dalam skripsi ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah mengenai:

1. Apa pengertian dan aspek-aspek dari konsepsi pendidikan Demokratis John Dewey?
2. Bagaimana posisi Ujian Nasional dalam penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia?
3. Apa landasan epistemologi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional?
4. Bagaimana Ujian Nasional dipandang dari konsepsi pendidikan Demokratis John Dewey?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Satu individu atau generasi tak akan dapat terus menopang dan menjalankan fungsinya dalam sosial. Agar sosial dapat terus berjalan,

transmisi pengetahuan dan kesadaran akan nilai-nilai yang berlaku dalam sosial kepada generasi baru dibutuhkan. Hal tersebut tidaklah didapat begitu saja tanpa proses pembelajaran yang berkelanjutan. Diselenggarakanlah pendidikan yang merupakan; proses transmisi pengetahuan, kebudayaan, dan nilai-nilai yang telah terbentuk, untuk dipelihara dan dikembangkan; serta penuntun dan pembimbing arah pertumbuhan generasi yang belum matang agar mampu berperan dalam sosialnya. Dengan itu, penyelenggaraan pendidikan ditujukan sebagai pengejawantahan kebutuhan sosial akan keberlangsungannya.

Keberlangsungan sosial bukanlah sesuatu yang berjalan statis. Sosial akan selalu berinteraksi dengan menyusutnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, penemuan-penemuan teknologi, kemudahan komunikasi, pola konsumsi, dan unsur-unsur lainnya. Transmisi pengetahuan dan nilai tanpa dibarengi dengan upaya pemaknaan kembali, tidaklah cukup menunjang keberlangsungan sosial. Diperlukan bentukan mental dan intelektual tiap individu yang mau dan mampu meresistensi upaya pemaparan sosial, agar sosial selalu terbuka bagi perubahan dan perkembangan. Yaitu melalui sistem pendidikan yang mampu memaksimalkan potensi kedirian yang akan sekaligus menjadi penopang demokrasi.

Sekolah sebagai lingkungan yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan proses pendidikan, diselenggarakan di atas dasar filosofi pendidikan tertentu. Oleh karena itu penentuan dasar filosofis dalam pendidikan akan turut berpengaruh bagi pergerakan sosial. Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai filosofi pendidikan yang mampu menjadi dasar bagi terselenggaranya pendidikan yang mendukung pembentukan sosial yang demokratis.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data, pemahaman, dan juga sajian argumentasi teoritis yang memadai, pengerjaan skripsi ini menggunakan metode analisa

studi literatur mengenai UN melalui kacamata pemaparan John Dewey tentang konsepsi pendidikan demokratis.

### **1.5. Kerangka Teori**

Sejarah manusia, khususnya di wilayah barat, adalah sejarah tentang perjuangan meraih kebebasan. Otoritas yang membelenggu manusia diceritakan sebagai kondisi yang sepenuhnya memunculkan kesengsaraan dan menekan kemajuan potensi kemanusiaan. Keterbelengguan manusia oleh otoritas eksternal juga memperlihatkan ketidakberdayaan dan gerak hidup sosial yang statis, dan oleh sebab itu sudah selayaknya diperangi.

Otoritas eksternal yang serupa kerajaan atau gereja mengikat individu sampai sebelum masa modern terlahir. Otoritas eksternal ini menempatkan manusia kedalam wilayah-wilayah eksistensial yang batas-batasnya tak boleh dilampaui. Belenggu otoritas eksternal diputus melalui afirmasi paham rasionalistik serta pelaksanaan sistem ekonomi kapitalistik. Hal yang ditekankan adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang sesungguhnya, secara mandiri, mampu mengupayakan pertimbangan-pertimbangan akan kediriannya. Manusia lalu diposisikan untuk bebas menentukan batas-batas wilayah kediriannya. Sebagai konsekuensinya, kondisi ketidakberdayaan yang muncul akan sepenuhnya dipandang sebagai kegagalan individu dalam memanfaatkan kebebasannya.

Ketika memfokuskan pembahasan mengenai aspek kebebasan manusia, pertanyaan yang muncul adalah apakah kehendak untuk bebas sesungguhnya inheren dalam diri manusia? Dan apakah kebebasan merupakan pengalaman yang identik dan sepenuhnya tanpa pengaruh faktor sosial dan ekonomi macam apapun?

Dalam era kebebasan, paham rasionalistik yang berkembang memutus ikatan kebergantungan manusia dengan dunia luar. Dengan demikian paham ini membuang jenis relasi tertentu yang selama ini dijalani manusia. Selain itu, sistem ekonomi kapitalistik memaksa manusia untuk memiliki tujuan di luar dirinya, melalui hasrat pemupukan modal. Manusia disatu-sisi diposisikan

untuk mengamini kesendiriannya, namun di sisi lain kediriannya ditekan dengan dipaksa memiliki tujuan-tujuan di luar dirinya.

Manusia, yang tak dapat memutus relasinya dengan sosial memiliki kebutuhan mendesak untuk menghindari kesendirian. Terputusnya ikatan-ikatan eksternal tersebut memaksa manusia untuk dapat mengatasi kecemasan akan kesendirian yang diakibatkannya. Individu akan makin terjerebab kedalam kubangan kecemasan dan keterasingan ketika kondisi kebebasan hanya dipandang sebagai: kondisi *kebebasan dari* dan bukan *kebebasan untuk*. Afirmasi terhadap pemahaman kondisi kebebasan sebagai *kebebasan untuk* akan mendorong tindakan manusia ke arah yang produktif. Sayangnya, kapitalisme telah membatasi pemahaman produktifitas pada tataran material. Manusia tidak diberi ruang untuk memiliki tujuan selain daripada pemupukan modal. Pada akhirnya terbentuklah manusia *automaton*, yaitu manusia yang berpikir dan bertindak serupa mesin. Manusia yang tidak mengalami pengalamannya sendiri. John Dewey menuturkan;

*“In general it may be said that the things which we take for granted without inquiry or reflection are just the things which determine our conscious thinking and decide our conclusion (Dewey, 1916, p. 13).*

Selama ini otoritas eksternal yang membelenggu dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menghalangi perwujudan kebebasan. Lewat pernyataan tersebut Dewey menegaskan bahwa faktor internal dalam diri manusia juga merupakan salah satu pemeran dalam pengukuhkan keterbelengguan manusia. Dewey memandang bahwa lingkungan membentuk pola perilaku tiap individu dengan melibatkannya dalam aktifitas yang bergerak ke arah tujuan dan konsekuensi tertentu. Lingkungan sosial, dalam keterkaitannya dengan partisipasi yang tidak dapat dielakkan individu, menyediakan pola pendidikan atau pengaruh yang tak disadari. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan lingkungan sosial yang mampu menyokong kedirian utuh tiap individunya.

Sampai saat ini, keperluan membentuk kedirian utuh tiap individu hanya ditemukan dalam prinsip sosial masyarakat yang demokratis.

Demokrasi merupakan sistem politik yang menekankan asas kesetaraan demi pemerataan distribusi kepentingan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, demokrasi memerlukan bangunan sosial-budaya yang dapat membentuk karakter masyarakat yang mau dan mampu terlibat dalam pembuatan putusan-putusan politik. Dewey mengungkapkan bahwa bangunan sosial-budaya tersebut dapat terbentuk melalui penyelenggaraan pendidikan yang juga demokratis. Yaitu pendidikan yang menitikberatkan penyelenggaraannya sebagai proses perbaruan makna pengalaman individual.

Konsep pendidikan demokratis John Dewey bertolak dari pemahaman bahwa dunia selalu dalam keadaan terus menjadi. Hal ini merupakan implikasi dari paham pragmatis yang dijadikan batasan kerangka pemikiran dalam filsafat pendidikannya. Pragmatisme memandang bahwa validitas kebenaran ditentukan dari konsekuensi yang dihasilkannya. Hal ini merupakan upaya untuk memecahkan kebuntuan pertentangan-pertentangan yang bersifat metafisis dalam filsafat. Yaitu dengan mengusungkan suatu metoda yang spesifik dengan menekankan penilaian kebenaran pada konsekuensi praktis dari setiap konsep atau gagasan.

Gagasan yang menjadi titik tolak filsafat pendidikan Dewey, bahwa dunia dalam keadaan terus menjadi, merupakan penolakan terhadap segala situasi atau kondisi lingkungan dan sosial yang stagnan dan stabil. Gagasan tersebut juga merupakan keharusan untuk memberi peluang terhadap munculnya konflik yang diperlukan untuk menggoyahkan stabilitas sosial. Hal ini dimungkinkan melalui pendidikan yang mampu memberikan stimulus yang besar pada tiap individu untuk mampu mengolah dan menformulasikan pengalamannya yang beragam.

Pengalaman merupakan segala situasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkan individu pada upaya kritis reflektif. Pengalaman memiliki sisi aktif-pasif yang saling bertautan. Sisi aktif pengalaman berupa upaya seseorang untuk mengadakan percobaan. Upaya ini, dengan melalui serangkaian kondisi tertentu, akan menarik subyek pengalaman ke dalam sisi pasif dari pengalaman, yaitu situasi yang merupakan

konsekuensi dari upaya percobaan tersebut. Pemaknaan terhadap pengalaman dimungkinkan melalui keterpautan antara kedua sisi pengalaman ini.

Pemilahan pengalaman yang memiliki nilai pedagogis diperlukan demi menghindari kekeliruan dalam memandang konsep pengalaman dalam pendidikan. Hal ini diperoleh melalui penentuan prinsip-prinsip dalam pengalaman. Dewey menggunakan prinsip pengalaman berkelanjutan sebagai kriteria pengalaman yang memiliki nilai dalam pendidikan. Apa yang dimaksud sebagai kriteria pengalaman yang berkelanjutan adalah ketika pemaknaan terhadap pengalaman yang telah dijalani dapat mengubah sesuatu dalam kualitas pengalaman yang akan datang. Oleh karena itu, prinsip pengalaman berkelanjutan akan memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan moral yang mengarah pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pengalaman adalah sesuatu yang teralami secara individual. Meskipun kondisi yang dan situasi yang mewujudkan suatu pengalaman tidaklah seutuhnya murni peran seorang individu saja. Dengan demikian, konsep subjektifitas mawujud dalam filsafat pendidikan John Dewey. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, ruang subjektifitas dalam demokrasi akan ditegaskan. Sehingga mawujud pemahaman bahwa *the ultimate aim of production is not production of goods, but the production of free human being associated with another on terms of equality*. (Chomsky, 1994, p. 37).

## **1.6. Pernyataan Tesis**

*Penyelenggaraan UN tidak membuka ruang bagi pengalaman yang menjadi titik tolak dan tujuan dalam konsepsi pendidikan demokratis John Dewey karena membakukan epistemologi positivistik sebagai satu-satunya metode pencapaian pengetahuan yang dianggap valid.*

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Tulisan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab satu dimulai dengan pembahasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, metode penelitian dalam penulisan, tujuan penulisan, kerangka teori yang dijadikan landasan, pernyataan *thesis statement*, dan juga sistematika penulisan. Tulisan dalam bab tersebut dimaksudkan agar teraih gambaran yang menyeluruh mengenai materi pembahasan dalam skripsi ini.

Selanjutnya, pada bab dua akan dijabarkan pemahaman umum mengenai teori filsafat pendidikan demokratis John Dewey, di dalamnya mencakup biografi dan unsur-unsur dalam filsafat pendidikannya. Pada akhir bab ini akan disimpulkan bahwa pendidikan merupakan landasan awal dalam pembentukan masyarakat demokratis yang diperlukan sebagai penyokong penyelenggaraan politik demokrasi.

Pembahasan pada bab tiga adalah mengenai permasalahan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Khususnya mengenai pembakuan kerangka epistemologis. Permasalahan yang muncul dari dijadikannya ideologi positivistik sebagai dasar epistemologis dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi gambaran utama bagaimana pembakuan kerangka epistemologis menjadi penghambat bagi terselenggaranya politik demokrasi.

Tulisan pada bab selanjutnya, yaitu bab empat, kerangka pikir John Dewey yang telah dijabarkan pada bab dua, akan dibahas secara lebih terfokus pada bahasan pengalaman dari filsafat pendidikan demokratisnya. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan bahwa konsep pengalaman dalam filsafat pendidikan John Dewey merupakan penolakan terhadap pembakuan kerangka epistemologis dalam penyelenggaraan pendidikan yang menjadi penghambat dalam pembentukan kebudayaan demokratis.

Bab lima merupakan bab terakhir yang merangkum kesimpulan dari penulisan skripsi ini.

## BAB 2

### FILSAFAT PENDIDIKAN DEMOKRATIS JOHN DEWEY

Pendidikan bagi John Dewey (1859-1952), pemikir pragmatis yang banyak melakukan kajian dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan di Amerika, merupakan upaya praksis yang sistematis dan terarah dalam proses pengembangan pengalaman yang dimungkinkan oleh individu sebagai anggota sosial. Relasi individu dan sosial dipandang Dewey sebagai dua aspek yang saling terkait. Pergerakan sosial terwujud melalui partisipasi daya individu-individu didalamnya. Sedangkan perkembangan individual secara maksimal hanya dimungkinkan melalui keterlibatannya dalam sosial.

Dengan demikian, bagi Dewey, proses pengembangan dalam pendidikan sudah seharusnya ditujukan untuk mempersiapkan individu agar mampu terlibat dalam sosialnya; yaitu untuk menggali dan mengupayakan peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi-potensi fundamental tiap individu sebagai pelaku sosial. Ini merupakan proses yang terus berlanjut karena kondisi diri individu dan lingkungan yang terus tumbuh dan berubah. Tujuan dari pendidikan pada akhirnya di letakkan pada prosesnya, yaitu bertujuan untuk memampukan setiap individu agar terus-menerus belajar memanusiakan dirinya (Dewey, 1916, p. 76).

Dewey juga memandang filsafat memiliki tugas penting dalam pendidikan; yaitu untuk menemukan konsepsi umum yang tepat dalam pendidikan melalui pemahaman aspek kemanusiaan secara utuh. Kategori dalam filsafat pendidikan, secara konseptual, terbagi menjadi empat aliran, yaitu: essentialisme, perenialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme (Hunnex, 2004, p. 93). Essentialisme memandang pendidikan berfungsi untuk mentransmisi aspek esensi kultural yang telah matang; perenialisme mengarahkan pendidikannya kepada transmisi kebenaran absolut yang universal dengan berbasis pada idealisme religious; progresivisme

mengarahkan konsep pendidikannya sebagai proses pengembangan tindakan dan intelegensi manusia agar dapat memecahkan problema kehidupannya; sedangkan rekonstruksivisme menempatkan pendidikan sebagai ranah implementasi tujuan sosial demi upaya rekonstruksi sosial (Rasyid, 2007, p. 55).

Dalam konsepsi-konsepsi filsafat pendidikan ini, terjadilah pergumulan ideologi dan politik. Secara sederhana ideologi dalam filsafat pendidikan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu: konservatif, liberal, serta kritis (Giroux, 1985). Ideologi pendidikan konservatif berpijak pada pandangan bahwa realitas berjalan dalam kerangka ketetapan alamiah yang transendental dan yang pada akhirnya akan melahirkan suatu ketetapan sejarah. Perjuangan melawan ketetapan-ketetapan ini diyakini sia-sia karena individu maupun sosial tidak memiliki daya yang secara alamiah mampu menentang ketetapan-ketetapan alami yang telah menyejarah. Upaya ini juga dianggap hanya akan melahirkan ketidakstabilan kondisi diri, lingkungan dan sosial. Dengan demikian, perbaikan dan perkembangan kondisi lingkungan sosial-kemasyarakatan hanya dapat diupayakan dengan mewujudkan suasana harmoni yang terbebas dari konflik dan kontradiksi. Disinilah tugas pendidikan dalam pandangan konservatif, yaitu sebagai media penyampai dan pembakuan ketetapan-ketetapan yang dianggap alamiah demi menciptakan kondisi sosial masyarakat yang turut di dalamnya. Konsepsi pendidikan parentalisme digerakkan oleh ideologi pendidikan ini.

Sedangkan ideologi pendidikan liberal berangkat dari cita-cita perwujudan individualitas yang menekankan pengembangan kemampuan dan melindungi hak serta kebebasan individu. Dengan demikian, pendidikan mesti berada dalam ruang yang terbebas dari intervensi sosial karena intervensi tersebut hanya akan menghambat perkembangan diri individu secara penuh dan utuh. Ideologi pendidikan liberal ini yang mendominasi landasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non-formal dewasa ini. Konsepsi pendidikan yang digerakkan oleh ideologi ini adalah konsepsi pendidikan esensialisme yang terobsesi pada pencapaian pengetahuan yang murni; yaitu pengetahuan positif.

Berbeda dengan ideologi konservatif yang berkonsentrasi pada pengupayaan dan penjagaan *status quo* serta liberal yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan hak-hak individual, bagi ideologi pendidikan kritis, pendidikan merupakan ruang perjuangan politik. Ideologi pendidikan kritis mengupayakan perubahan struktur-struktur fundamental dalam sosial, politik dan ekonomi demi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai pecipta ruang-ruang yang mendorong peserta didik untuk mau dan mampu melakukan upaya dekonstruksif reflektif terhadap ideologi-ideologi dominan demi mewujudkan sistem sosial yang demokratis.

Sosial yang demokratis merupakan penyokong stabilitas politik demokrasi. Karena sosial yang demokratis akan memberi wadah, mengkondisikan, dan mengupayakan karakter sosial yang menolak otoritas eksternal atas diri dengan menekankan pemahaman akan perannya sebagai warga Negara dan tanggungjawabnya sebagai masyarakat. Demokrasi dalam hal ini diperlukan sebagai sistem politik yang menjamin pilihan individual yang dapat menjadi pengaman bagi pemaksaan nilai yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa.

Bab ini akan memfokuskan pembahasannya pada rumusan konsepsi pendidikan demokratis John Dewey yang merangkum konsepsi pendidikan progresif dan konstruktif yang digerakkan oleh ideologi kritis, serta prinsip-prinsip liberalisme yang menjunjung tinggi hak-hak individual dan menekankan penelitian ilmiah sebagai metode pencapaian pengetahuan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

## **2.1. Sosok Intelektual John Dewey**

John Dewey, filsuf yang memberikan pengaruh besar pada kemajuan sistem pendidikan Amerika dengan gagasan-nya yang kontroversial mengenai pendidikan, lahir di Vermont pada tanggal 20 Oktober 1859. Dewey dikenal sebagai pemilik gagasan yang banyak mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pendidikan

Amerika. Ia adalah anak ketiga dari seorang ayah yang menggemari sastra, Archibald Dewey, dan seorang ibu bernama Lucina Artemisia. Di usianya yang ke-enam belas ia memasuki universitas di Vermont dan meraih nilai tertinggi dibidang sains. Dewey melanjutkan studinya dalam bidang filsafat dan mendapatkan gelar doktor dari John Hopkins University tahun 1884 dengan disertasi tentang filsafat Kant. Sebagian alasan mengapa nama Dewey menjadi besar adalah karena usianya yang panjang dan dimanfaatkannya dengan menghasilkan banyak tulisan. Terdapat kurang lebih 37 jilid karya yang telah diterbitkannya.

Ketertarikannya dengan filsafat semakin besar ketika mendapat dorongan dari pengajarnya semasa kuliah di Vermont. Tulisan Dewey di awal-awal karir menulisnya banyak dipengaruhi oleh paham neo-hegelianisme. Namun ketertarikannya pada paham neo-hegelianisme ini ditinggalkannya ketika ia berkenalan dengan psikologi eksperimental karya G. Stanley Hall dan William James yang saat itu sedang berkembang di Amerika. Ketertarikan baru ini yang membawanya untuk menjadikan telaahan psikologi Immanuel Kant sebagai disertasi doktoralnya.

Tahun 1884 Dewey menjabat sebagai Kepala Departement Filsafat, psikologi, dan pendidikan di Universitas Chicago. Pada masa ini doktrin materialisme begitu kental mempengaruhi dan membatasi wilayah kajian Dewey. Namun pertemuannya dengan Jane Addams, pelopor perjuangan terhadap pembentukan undang-undang bagi kaum urban Amerika, menunjukkan pada Dewey perihal kemanusiaan yang ditindas dari berbagai sisi. Hal ini membawa Dewey pada pemahaman bahwa realitas tak cukup dipandang sebagai wujud material namun memaksa dipahami pula secara rasional.

Masa-masa yang Dewey habiskan di universitas Chicago antara tahun 1884 sampai dengan 1904 membawa perubahan penting dalam pemikiran dan karirnya. Mendapat pengaruh dari William James dengan gagasannya mengenai mengenai psikologi eksperimental, Dewey tergerak untuk memperdalam kajian pendidikan

progresif dengan mengembangkan model sekolah laboratorium. Dewey dengan cepat dikenal sebagai filsuf sekaligus pendidik. Namun pengamat Dewey dalam bidang pendidikan jarang memperhatikan argumentasi filosofis yang mendasari kajiannya atas pendidikan. Sebaliknya, mereka yang fokus pada argumentasi filosofis Dewey tidak pula memiliki minat untuk sekaligus memperhatikan kajiannya mengenai pendidikan. Keterpisahan ranah kepentingan masing-masing pengamat ini mempertegas jurang perpecahan yang telah lama terjadi antara kajian teori dan praktek, sebuah dikotomi yang sedang dicoba atasi oleh Dewey sepanjang karirnya.

Produktivitas Dewey meningkat semenjak tahun 1899. Beberapa di antara karyanya mengenai pendidikan adalah *The School and Society* (1899), *The Child and The Curriculum* (1902), *Interest and Effort in Education* (1913), dan *Democracy and Education* (1916). Ia juga menerbitkan beberapa kajian filsafat dan pragmatisme seperti *Studies in Logical Theory* (1903), *The Realism of Pragmatism* (1905), *The Postulate of Immediate Empiricism* (1905), *What Pragmatism Means by Practical* (1908), *Ethics* (1908), *The Pragmatism of Pierce* (1916), *Reconstruction in Philosophy* (1920), *Human Nature and Conduct* (1922), *From Absolutism to Experimentalism* (1930), dan *How We Think* (1933).

Tahun 1904 Dewey mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Departemen Filsafat di Universitas Chicago dan segera menjadi guru besar di Universitas Columbia. Dewey mengajar sebagai dosen filsafat di Universitas Columbia selama 47 tahun sembari terus menyelesaikan dan menerbitkan karya-karyanya yang membicarakan mengenai pendidikan, filsafat sosial, psikologi, dan logika.

Minatnya pada psikologi banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori sosial Pierce dan James. Pengaruh ini membantu Dewey untuk mengembangkan gagasan pendidikannya yang ditujukan untuk perbaikan kondisi kemanusiaan. Bahwa pendidikan bukan hanya proses pemberian pengetahuan yang bersifat statis. Keterampilan dan pengetahuan siswa dari proses belajar harus diintegrasikan

sepenuhnya ke dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan dalam dunia nyata dalam kerangka nilai demokratis. Pada masa ini ia pun aktif turut serta dalam pergerakan sosial mengenai ketegangan antar kelas, serikat buruh, dan perjuangan hak pilih. Dewey lalu memutuskan untuk pensiun sepenuhnya dari kegiatan universitas pada tahun 1939 dan tetap produktif menulis mengenai isu-isu intelektual dan sosial sampai menjelang ajalnya pada tanggal 1 Juni 1952.

## 2.2. Pragmatisme

Dalam memahami pemikiran Dewey, perlu ditekankan bahwa ia menitikberatkan filsafatnya pada pragmatisme. Pengertian pragmatisme, yang penjabarannya definitifnya sulit didapatkan, dapat diraih melalui pemahaman mengenai karakteristik dan prinsip para pemikir pragmatis dalam penyusunan teori pengetahuannya. Secara umum, pragmatisme berpijak pada prinsip bahwa makna suatu proposisi atau kebenaran ditekankan pada nilai guna atau konsekuensi terhadap tingkah laku seseorang.

Sebelum kemunculan pragmatisme, rasionalisme dan empirisme menjadi dua paham besar yang memayungi gerak pemikiran filsafat. Pemikiran rasional menekankan pentingnya kerja rasio manusia karena melaluinya manusia dapat memahami dan menjelaskan alam semesta. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan bersifat spekulatif. Filsafat spekulatif berawal dari hasil perenungan Descartes. Ia menjelajahi problema-problema mendasar dalam pemikiran dan pengetahuan demi menjawab pertanyaan mengenai *“Bagaimana saya dapat mengetahui sesuatu, dan bagaimana pengetahuan tentang hal tersebut dapat dipastikan?”*

Dalam memahami jawaban Descartes atas pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa satu-satunya model pengetahuan yang jelas dan pasti bagi Descartes adalah Matematika. Karena menurutnya model pengetahuan ini memiliki langkah-

langkah pasti dalam menyusun suatu kesimpulan yang juga tidak terbantahkan. Maka setiap upaya mencapai pengetahuan haruslah melewati metode matematis yang deduktif, yaitu berangkat dari asumsi kebenaran yang paling abstrak, umum, sederhana, jelas, dan pasti menuju ke asumsi kebenaran yang lebih rumit (Scruton, 1986, p 34). Melalui metode ini kepastian pengetahuan akan terlahir dengan sendirinya. Oleh karena itu, bagi rasionalisme, kebenaran adalah hal yang mustahil diingkari dan dipahami secara bertentangan (Kattsoff, 1986, p 137).

Sedangkan, kaum empiris yakin bahwa realitas bersifat plural. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti, pengetahuan harus selalu mengacu pada realitas. Pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari pengolahan konsep dan gagasan yang dicerap melalui persepsi indrawi (Kattsoff, 1986, p 132). Pengalaman, yang melibatkan persepsi indra secara langsung, adalah jalan untuk memahami dunia.

Pengetahuan dalam empirisme diperoleh melalui pengolahan konsep-konsep yang tercerap melalui indera. Akal adalah ruang yang secara pasif menampung dan mengolah pengetahuan. Pengetahuan dalam empirisme hanya dapat diperoleh melalui pembuktian-pembuktian empirik yang pasti karena sumber-sumber pengetahuan dalam empirisme harus dapat dilacak sampai ke taraf pengalaman indrawi yang paling awal dan sederhana (Kattsoff, 1986, p 133).

Bagi seorang pragmatisme, persoalan mengenai apakah pengetahuan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui penalaran rasio atau pengamatan empiris, sama-sama belum memiliki makna dan tidak dapat diselidiki kebenarannya. Charles Sanders Peirce, filsuf pencetus awal pragmatisme, dalam *How to Make Ideas Clear* mengungkapkan gagasannya bahwa validitas kebenaran dari suatu proposisi terletak pada konsekuensi yang dihasilkannya (*consequences as a test of the validity of propositions*). Hal ini berarti, bagi pragmatisme, suatu proposisi hanya bermakna jika membawa akibat praktis. Dengan penekannya pada nilai guna, pragmatisme dengan demikian:

- (1) menolak nilai-nilai universal dan absolut,
- (2) menggeser logika formal dari posisi dominannya dalam kaidah berpikir,
- (3) meletakkan validitas kebenaran pada nilai guna bagi kepentingan tiap individu, bukan pada objektivitas dan korespondensialitas, dan
- (4) memposisikan dan menggunakan ide atau pengetahuan yang dihasilkan sebagai instrumen dalam bertindak.

### **2.3. Pragmatisme sebagai Kerangka Berpikir**

John Dewey dikenal sebagai salah satu filsuf yang mencetuskan dan menggunakan kerangka pikir pragmatis dalam karya-karyanya. Perhatian Dewey di bidang pragmatisme banyak difokuskan untuk mengatasi permasalahan sosial seperti demokrasi dan etika. Sebagai pemikir yang berorientasi pada pragmatisme, Dewey menekankan bahwa konsekuensi dari akibat praktis yang dihasilkan oleh proposisi haruslah berkesesuaian dengan proposisi itu sendiri. Jika pernyataan mengenai penalaran rasio sebagai hakekat dari pengetahuan sejati itu memiliki pengaruh pada tindakan-tindakan manusia dan menghasilkan suatu konsekuensi yang berkesesuaian, maka pernyataan tersebut dianggap memiliki makna dan dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Dengan demikian, kebenaran selalu bersifat prospektif, terbuka pada verifikasi, dan hanya dapat diketahui melalui upaya-upaya percobaan dan penyelidikan (Margolis, 2006, p 60).

Pragmatisme bagi Dewey merupakan *frame of mind* atau sebuah kerangka berfikir. Aktifitas berfikir, menurut Dewey, merupakan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dicerap melalui pengalaman. Oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh melalui aktifitas berfikir menjadi bermakna ketika menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik (Kattsoff, 1986, p 183). Proses berfikir diandaikan Dewey lebih luas dari sekedar aktifitas kognitif. Karena ketertarikan dan potensi diri tiap

individu yang unik akan terlibat dalam proses pencerapan pengalaman dan aktifitas pengolahannya.

Pengetahuan yang dihasilkan melalui proses berfikir akan mengarahkan pola pembentukan dan pencerapan atas pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, berfikir merupakan suatu proses yang selalu ditujukan untuk mengatasi permasalahan hidup manusia. Ini merupakan teori instrumentalialia tentang pengetahuan yang dicetuskan oleh Dewey. Yaitu teori pengetahuan yang disusun dengan menarik nilai-nilai fungsional yang termuat dalam berbagai konsep, pertimbangan, dan penyimpulan teoritis tentang pengetahuan. Dewey merumuskan esensi instrumentalisme pragmatis sebagai *to conceive of both knowledge and practice as means of making good excellencies of all kind secure in experienced existence* (Stumpf, 1983, p 383). Ia memberikan istilah pragmatisme dengan *instrumentalism, operationalism, functionalism, dan experimentalism.*

#### **2.4. Konsepsi Pendidikan Demokratis John Dewey**

*“The first signifies not only more numerous and more varied points of shared common interest, but greater reliance upon the recognition of mutual interest as a factor in social control. The second means not only freer interaction between social groups (once isolated so far as intention could keep up a separation) but change in social habit—it’s continuous readjustment through meeting the new situations produced by varied intercourse. And these two traits are precisely what characterize the democratically constituted society.”* (Dewey, 1916, p.78).

Pendidikan dijabarkan Dewey sebagai upaya untuk membentuk dan jika perlu mengubah kebiasaan melalui pengarahan pola-pola rangsangan pengalaman yang telah disistematisir dan mengarah pada tujuan tertentu. Term kunci dari konsepsi

pendidikan demokratis John Dewey adalah *pengalaman*. Pengalaman merupakan wadah bagi kemampuan intelektual untuk melakukan upaya refleksi atas berbagai elemen dan faktor yang membentuk pengalaman. Pola *pengalaman* Dewey mengacu pada pola pemaknaan tanda Pierce yang triadik. Pengacuan ini terlihat dalam pemahaman Dewey mengenai pengalaman sebagai keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi manusia, sebagai organisme yang terus tumbuh dengan lingkungan sekitarnya yang juga terus berubah (Rasyid, 2007, p. 96).

Dengan demikian, Dewey memahami pengetahuan tidak semata-mata dilahirkan dari penalaran yang transenden, namun dari pengalaman— yaitu proses dialektik antara manusia dan lingkungan yang mendorong proses reflektif. Dengan demikian pengetahuan diperoleh melalui eksperimen yang diwujudkan dalam upaya-upaya praktis manusia atau dengan hidup di dunia. Dewey melanjutkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan *bernilai benar* bukan dalam tataran ide namun ketika memiliki nilai praktis dalam kehidupan manusia. Nilai praktis adalah tindakan yang berguna dalam memecahkan permasalahan kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, fungsi pendidikan seharusnya tidak diarahkan sebagai instrumen untuk mengeksploitasi sosial, tetapi sebagai media yang memungkinkan individu menempatkan dirinya dalam sosial melalui pengolahan pengalaman kedirian secara berkelanjutan. Yaitu dengan mengkonsepsikan tujuan, fungsi, metode, dan kurikulum pendidikan yang mendorong dan menggerakkan setiap peserta didik untuk mau dan mampu mengolah pengalamannya secara berkelanjutan sebagai anggota sosial.

Konsepsi pendidikan yang diusung oleh Dewey adalah konsepsi pendidikan demokratis. Konsepsi pendidikan demokratis merupakan konsepsi pendidikan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip demokratis secara sistematis dan terarah dengan menekankan cakupan pengembangan maksimal potensi individu sebagai anggota sosial baik dalam tataran intelektual dan emosional. Konsepsi ini merombak tatanan

ide-ide tradisional dalam praktek belajar mengajar, dimana siswa ditempatkan sebagai objek yang secara pasif menerima informasi dan materi belajar.

#### 2.4.1. Fungsi Pendidikan Demokratis

Dewey mengidentikkan pendidikan dengan kata *perkembangan*. Apa yang dimaksud dengan perkembangan manusia adalah kemampuannya untuk tetap bergerak mengupayakan progresivitas demi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Setiap manusia dilahirkan sebagai individu-individu yang *immature* namun memiliki potensi alamiah untuk terus berkembang. *Immaturity* ini membutuhkan pengarahannya berupa pelatihan dan pembiasaan-pembiasaan oleh individu yang telah dewasa di sekitarnya. Manusia lalu hidup di tengah-tengah sosial demi upayanya bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk menyalurkan nilai-nilai sosial yang telah ada agar setiap individu dapat menjadi bagian dan terlibat dalam sosialnya, dan sekaligus demi upayanya dalam bertahan hidup kemudian dirangkum dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan memiliki fungsi sebagai proses sosial.

Dewey dalam *Democracy and Education* menyatakan bahwa:

*“Such a society must have a type of education which gives individuals a personal interest in social relationships and control, and the habits of mind which secure social changes without introducing disorder”*. (Dewey, 1916, p. 78)

Fungsi pendidikan sebagai proses sosial tidaklah berarti bahwa pendidikan merupakan instrumen untuk mengeksploitasi sosial, namun lebih sebagai media yang memungkinkan individu menempatkan dirinya dalam sosial melalui pengolahan pengalaman kedirian yang berkelanjutan. Transmisi pengetahuan masa lalu dalam pendidikan membantu individu untuk mempercepat perkembangan kediriannya dalam

sosial. Sehingga tiap individu tidak perlu untuk mengulang proses memperoleh pengetahuan yang telah berhasil dicapai oleh peradaban.

Kondisi yang memungkinkan transmisi pengetahuan berjalan adalah terselenggaranya komunikasi antara generasi baru dengan generasi pendahulunya. Dalam komunikasi, dijabarkan Dewey, akan terjadi transmisi pola perilaku, perasaan, dan pemikiran. Transmisi ini akan memperkecil *gap* pengetahuan antar anggota sosial sekaligus menjadi modal bagi generasi baru dalam berperan dikehidupan sosialnya. Dewey juga menjabarkan bahwa komunikasi itu sendiri memiliki nilai edukatif. Menjadi pelaku dalam komunikasi akan memperluas dan mengubah pengalaman, serta menstimulasi dan memperkaya imajinasi. Terselenggaranya komunikasi pun menuntut diformulasikannya pengalaman, dengan mempertimbangkan pengalaman orang lain, agar terbentuk acuan-acuan pemahaman yang dapat dimengerti.

Disimpulkan Dewey bahwa, pada akhirnya pengajaran dan pembelajaran bukan semata diselenggarakan atas dasar kepentingan sosial, namun juga untuk memberikan stimulus yang besar pada tiap individu untuk mampu mengolah dan menformulasikan pengalaman. Yaitu sebagai *reorganizing*, *reconstructing*, dan *transforming* (Dewey, 1916, p. 50). Hal ini dilakukan agar pengalaman dapat lebih mudah dikomunikasikan supaya lebih dapat disarikan maknanya sehingga memiliki nilai guna.

#### **2.4.2. Tujuan Pendidikan Demokratis**

Pendidikan merupakan proses sosial, karena fungsi pendidikan adalah memberi arahan dan mengembangkan individu-individu yang belum dewasa agar dapat berpartisipasi dalam sosialnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan demokratis merupakan kebutuhan untuk membentuk individu-individu yang tidak bersikap apatis terhadap sosial dan memiliki kemampuan untuk terus menciptakan perubahan demi perkembangan sosial. Pendidikan sebagai proses sosial mengandung

pengertian bahwa pendidikan harus mampu mengakomodir perbedaan kebutuhan dan mengembangkan kemampuan serta potensi individu yang tumbuh dalam perilaku sosial yang beragam. Untuk itu, dalam menentukan tujuan dari pendidikan, Dewey mengajak untuk tidak mencoba memandang makna tujuan pendidikan sebagai sebuah akhir dari proses pendidikan. Ketika hal ini dilakukan, maka cenderung akan terjadi generalisasi dan pembatasan wilayah belajar demi pencapaian tujuan pendidikan. Generalisasi dan pembatasan ini akan menghambat, menggeser, dan pada akhirnya mengganti tujuan pendidikan yang akan muncul dan terbentuk dari tumbuh-kembang pengalamannya yang beragam.

Ketika muncul pertanyaan bahwa hasil pendidikan macam apa yang diharapkan tanpa generalisasi dan pembatasan wilayah belajar? Pertama-tama mesti dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan generalisasi dan pembatasan wilayah belajar adalah; pengumpamaan bahwa setiap individu membutuhkan pola pendidikan yang seragam yang dirancang tanpa melibatkan interaksi dengan faktor psikologis dan potensi serta kemampuan fundamental tiap individu. Tujuan memang membutuhkan keteraturan. Namun, Dewey menegaskan bahwa keteraturan hanya dapat tercipta dengan melengkapi progresivitas proses yang melibatkan berbagai faktor, bukan dalam bentuk kontrol satu arah terhadap langkah-langkah proses pengembangan diri melalui generalisasi dan pembatasan wilayah belajar.

Makna tujuan dapat dipahami sebagai tinjauan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai. *An aim means foresight in advance of the end or possible termination* (Dewey, 1916, p. 53). Dengan demikian, pembahasan mengenai tujuan dalam pendidikan menjadi omong-kosong ketika ide yang menjadi pendasaran dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mempersilahkan atau tidak memberi kemampuan untuk melakukan tinjauan mengenai kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Karena hal ini akan menghilangkan kesempatan tiap peserta dan penyelenggara pendidikan untuk (1) mengembangkan kemampuan dalam mengobservasi kondisi-kondisi alamiah yang mencakup potensi maupun hambatan dalam menggapai hasil yang dituju, (2) merangkai tindakan-tindakan yang diperlukan

dalam mencapai tujuan, (3) serta memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan alternatif ketika tindakan yang dilakukan tidak mengarah pada hasil yang dituju. Perlu kerja intelektualitas dalam upaya penentuan dan penggapaian tujuan yang ditentukan.

Dalam membicarakan perihal tujuan dalam pendidikan ini, Dewey menekankan bahwa pendidikan merupakan ide abstrak yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tinjauan kedepan demi menentukan tujuan-tujuannya. Pihak yang memiliki kemampuan ini adalah murid, guru, orang tua, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka akan terdapat keberagaman dan perubahan arah tujuan seiring pertumbuhan pengalaman tiap individunya. Oleh sebab itu, karakteristik demokratis mesti diterapkan dalam penentuan tujuan pendidikan, yaitu dengan: (1) dilakukan observasi atas potensi dan kebutuhan diri anak didik dalam menentukan tujuan pendidikannya, (2) menentukan tujuan yang memungkinkan pengaplikasian metode pencapaian yang kooperatif dengan diri anak didik, (3) memposisikan pendidik sebagai pembimbing yang mengarahkan pada tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

*The aim of education is to enable individuals to continue their education—or that the object and reward of learning is continued capacity for growth. Now this idea cannot be applied to all members of a society except where intercourse of man with man is mutual, and except where there is adequate provision for the reconstruction of social habits and institution by means of wide stimulation arising from equitably distributed interest. And this is means a democratic society. (Dewey, 1916, p. 53)*

### **2.4.3. Metode Pendidikan Demokratis**

Perumusan metode pendidikan merupakan bentuk pelembagaan pendidikan. Tanpa pelembagaan pendidikan, transmisi seluruh pengetahuan dan nilai-nilai sosial yang kompleks sulit dimungkinkan. Perumusan metode pendidikan demokratis didasarkan atas pemahamannya terhadap sisi alamiah pengalaman. Yaitu berfungsi sebagai penggerak individu peserta didik agar terus bertindak dalam pengalaman. Fungsi ini diwujudkan dengan mengkondisikan lingkungan yang memberikan rangsangan yang mampu menimbulkan dan mengembangkan daya pikir serta bertindak. Kondisi ini diterapkan diatas prinsip pengalaman yang berkelanjutan. Yaitu bahwa pengalaman merupakan upaya dalam melakukan percobaan, menjalani konsekuensi, dan menemukan keterpautan atas berbagai hal melalui upaya reflektif, dan proses ini terus berlanjut.

Perumusan metode pendidikan dimulai dengan pertimbangan bahwa, sisi alamiah individu yang lebih dahulu aktif dan berkembang adalah sisi ekspresif motoris ketimbang sisi keadaran reflektisnya. Sisi kesadaran reflektif akan berkembang seiring interaksinya dengan lingkungan yang membentuk pengalaman. Pada nantinya, bentukan kesadaran individu akan difungsikan sebagai pengontrol tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu, agar metode pendidikan berjalan dengan efektif; pengaplikasiannya harus bersifat fleksibel agar memberi ruang bagi perubahan kondisi dan perkembangan intelektual; mudah dimengerti dan diaplikasikan; mendorong sikap berani bertanggung jawab dalam setiap kegiatan berpikir maupun tindakan; mengkondisikan lingkungan pendidikan layaknya lingkungan masyarakat konkrit sehingga peserta didik memperoleh gambaran mengenai pengalaman yang dekat dengan kehidupan sosial yang nyata. Rumusan metode pendidikan yang dihasilkan pada akhirnya akan berfungsi sebagai kerangka dalam perumusan kurikulum pendidikan.

Secara umum, gambaran proses pendidikan saat ini lebih didominasi oleh penyampaian dan bukan pengolahan informasi. Hal ini dikarenakan proses pendidikan berpusat pada kegiatan mendengarkan dan menghafalkan bukan interpretasi makna terhadap apa yang dipelajari dalam upaya membangun

pengetahuan. Proses pendidikan masih didominasi oleh pengajar yang otoriter dimana peserta didik ditempatkan sebagai objek, sehingga membatasi peluang bagi peserta didik untuk berkreasi demi mengembangkan potensi kediriannya yang beragam.

Metode pendidikan demokratis merupakan bentuk pendidikan yang, disatu-sisi, menempatkan pendidik dan peserta didik dalam posisi yang setara yaitu sebagai subjek pengalaman dan, disisi lain, menempatkan pendidik sebagai pembimbing yang memandang peserta didik sebagai subjek sekaligus objek pengalaman. Secara alamiah terdapat faktor yang menempatkan pendidik dalam posisi yang lebih dari peserta didik yaitu tingkat kematangan fisik, mental, dan intelektual. Namun perlu ditekankan bahwa posisi pendidik yang lebih dari peserta didik merupakan konsekuensi natural dari tingkat kematangan lebih yang dicapai pendidik. Oleh pendidikan demokratis, posisi antara pendidik dan peserta didik tidak ditempatkan dalam hirarki, namun ditempatkan sebagai dua aspek yang memiliki kualitas berbeda dan saling membutuhkan. Sehingga posisi pendidik tidak dimanfaatkan sebagai media indoktrinasi pengetahuan, namun sebagai pembimbing peserta didik dalam mengolah pengalamannya secara maksimal.

Maka metode pendidikan demokratis lebih mengarah pada metode diskusi dan tanya jawab —yang memberi ruang baik bagi pendidik dan peserta didik untuk menceritakan pengalamannya dimana hasil diskusi ini akan dijadikan acuan dalam mengkaji dan merumuskan metode pembelajaran yang tepat, pemberian tugas —yang difungsikan sebagai arahan bagi peserta didik untuk mengolah pengalamannya secara sistematis dan berkelanjutan, serta problem solving. Metode ini diharapkan berjalan dalam suasana yang dialogis.

Upaya pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan metode pendidikan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai kajian dan perspektif yang tentunya dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Perspektif psikologi perkembangan anak misalnya, dapat membantu merumuskan prinsip-prinsip dasar dan pola umum dari fase perkembangan anak sehingga metode pendidikan yang

dirumuskan tepat sasaran. Menurut Erik Erikson (Erikson, 2007, p. 46-48), terdapat delapan tahap dalam fase perkembangan anak —umumnya muncul dua unsur psikologis yang saling bertentangan, namun dialektika diantara kedua unsur tersebutlah yang membangun integritas dan segenap potensi diri anak— yaitu; tahun pertama kehidupan anak dimana unsur psikologis yang dominan dan mengarahkan pertumbuhannya adalah rasa percaya dan ketidakpercayaan; masa 1 sampai 3 tahun yaitu sikap yang penuh dengan otonomi sekaligus peragu, masa kanak-kanak awal, 3 sampai 5 tahun adalah masa berkembangnya inisiatif yang seringkali dibarengi rasa bersalah; masa kanak-kanak tengah dan akhir yaitu 6 tahun sampai dengan fase awal remaja dimana mulai tumbuh hasrat untuk bekerja keras yang juga seringkali dibarengi dengan rasa inferior; dan masa remaja yaitu usia 10 sampai 20 tahun yang mulai mengenal dan berupaya menggapai identitas. Atau melalui perspektif kajian pemetaan wilayah kecerdasan yang diungkapkan oleh Gardner:

”Delapan kategori yang komprehensif atau delapan kecerdasan dasar yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis-jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis”. (Gardner, 2000, p. 2).

Hal ini menuntut pendidik untuk berperan aktif dalam penanganan masing-masing siswa yang memiliki perbedaan tingkat perkembangan psikologi dan potensi kecerdasannya.

Metode pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah:

1. Menekankan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam mengekspresikan diri dengan tetap berpedoman pada norma dan etika. Sehingga pendidikan harus memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri. Metodologi pembelajaran yang dipilih harus memungkinkan hal tersebut misalnya diskusi, seminar, observasi, kegiatan alam, dan eksperimen.

2. Menyelenggarakan kegiatan belajar dalam kelompok. Proses belajar dalam kelompok akan membina sikap toleransi dan memberi ruang bagi interaksi antar peserta didik. Sehingga para peserta didik dapat mempelajari sikap toleransi dan gotong royong dalam mencapai suatu tujuan bersama.
3. Memberi ruang pada peserta didik untuk menetapkan tata tertib atau aturan yang harus ditaatinya sendiri.
4. Melakukan evaluasi dalam pendidikan tidak hanya ditujukan kepada penilaian prestasi siswa tetapi juga penilaian terhadap kinerja pendidik, sekolah, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sehingga terbuka ruang dialog antara kebutuhan peserta didik dengan keseluruhan unsur dalam sistem pengajaran yang diterapkan sekolahnya.

#### **2.4.4. Kurikulum Pendidikan Demokratis**

Dalam Sisdiknas dijabarkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum terangkum fungsi dan tujuan pendidikan. Sedangkan perumusannya dikerangkai oleh metode pendidikan. Dengan demikian, kurikulum pendidikan demokratis harus berfungsi sebagai proses sosial yang membimbing proses perkembangan diri peserta didik dalam tataran mental dan intelektual; bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk terus bertindak dan bekesadaran reflektif dalam pengalaman; dan dikerangkai oleh metode yang memperhatikan kesinambungan antara berbagai aspek dalam pembentukan pengalaman.

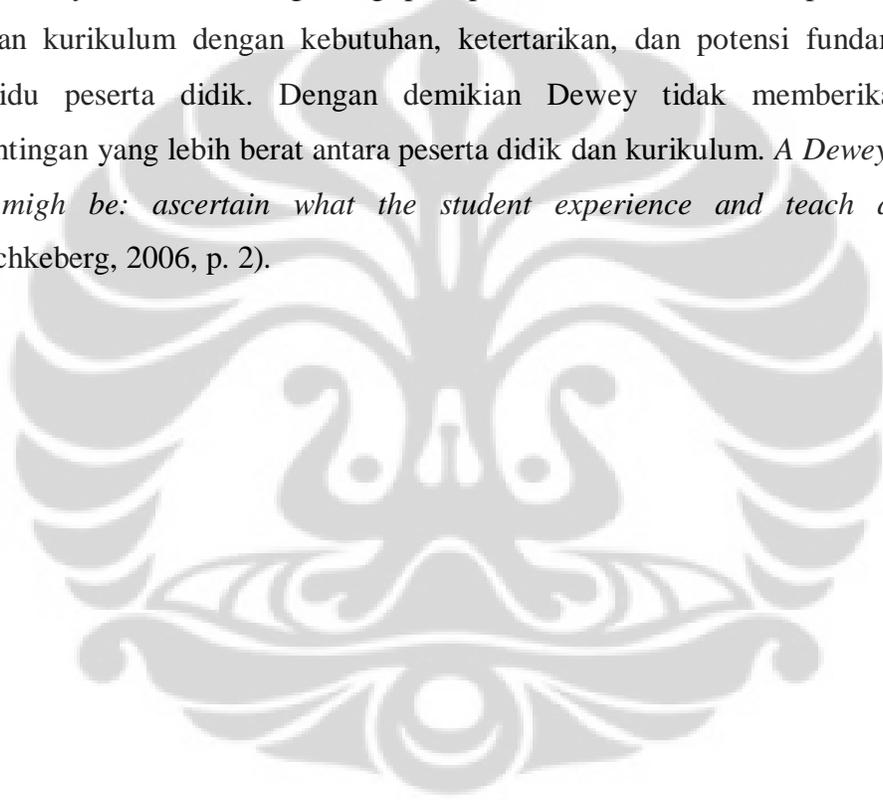
Dewey mengajukan mata pelajaran dasar yang harus terdapat dalam kurikulum pendidikan demokratis yaitu sejarah, geografi, bahasa, dan kajian ilmiah. Mata pelajaran ini mencakup aspek pengembangan pengalaman individu sebagai anggota sosial. Kajian sejarah dapat memberikan gambaran mengenai relasi tiap

individu dalam masyarakat dalam rentang kesejarahan. Geografi akan memperlihatkan kondisi kemanusiaan dalam dimensi kewilayahannya. Bahasa dikaji sebagai instrumen logis dalam pencapaian pengetahuan sekaligus alat pengungkapan ekspresi mental dan intelektual dalam interaksi sosial. Kajian ilmiah— yang merupakan alat observasi, kalkulasi, identifikasi, dan prediksi atas fakta yang oleh pandangan positivistik ditempatkan sebagai metode pencapaian pengetahuan yang paling valid— juga diperlukan sebagai alat dalam memperoleh implikasi logis dari kegiatan intelektual individu.

Namun, banyak faktor telah mendistorsi representasi dari muatan kurikulum ini. Seperti pengetahuan ilmiah yang merepresentasikan keteraturan sistem relasi antar berbagai konsep yang saling terkait melalui ekspresi intelektual. Abstraksi pengetahuan yang menjadi hasil dari ekspresi intelektual tersebut dapat menjadi sangat berarti bagi masing-masing individu (Matthews, 1994), baik sebagai pengarah tindakan atau pengembangan daya intelektual lewat penjelajahan dunia gagasan. Kajian ilmiah telah memberikan perkembangan atas cara manusia hidup di dunia. Metode penelitian dalam kajian ilmiah turut membangun pluralitas model pengetahuan yang berfungsi menyokong upaya pembentukan sosial dan politik yang demokratis. Namun Dewey menekankan bahwa *“we must sensitive to the contexts in which inquiry is used since it is ‘context bound’ and recognize that it is ‘self-correcting’”* (Dewey, 1916, p. 44).

Karena celakanya kajian ilmiah direpresentasikan sebagai kajian yang semata-mata empirik dan sama sekali tidak relevan atau berhubungan dengan ketertarikan dan minat diri peserta didik yang merupakan faktor dalam pembentukan pengalaman. Kajian ilmiah lalu dipisahkan dari wilayah pengalaman dan dikurung dalam ruang-ruang akademis. Hal ini kemudian menyebabkan kajian ilmiah menjadi tertutup dan dibakukan sebagai metode pencapaian kebenaran yang paling valid karena direpresentasikan sebagai kajian yang sama sekali tidak melibatkan unsur subjektivitas.

Apa yang menjadi tantangan dalam perumusan kurikulum pendidikan adalah bagaimana meleburkan batas antara minat individu yang bersifat personal dan khazanah pengetahuan sosial yang telah dirancang dengan meminimalisir kepentingan yang semata-mata bersifat personal. Dewey memahami permasalahan ini sebagai problem yang muncul dari pandangan dualistik atas peserta didik dan kurikulum. Dewey berupaya menyingkirkan problem ini dengan melibatkan unsur psikologis masing-masing peserta didik dalam setiap muatan kurikulum. Dengan kata lain, Dewey memberikan tugas bagi para pendidik untuk lebih mampu menyesuaikan muatan kurikulum dengan kebutuhan, ketertarikan, dan potensi fundamental tiap individu peserta didik. Dengan demikian Dewey tidak memberikan muatan kepentingan yang lebih berat antara peserta didik dan kurikulum. *A Deweyan twist on this might be: ascertain what the student experience and teach accordingly* (Kruchkeberg, 2006, p. 2).



## BAB 3

### PENGALAMAN SEBAGAI ASPEK PENDIDIKAN DEMOKRATIS

Dalam memahami pemikiran Dewey mengenai pendidikan demokratis, penelusuran pandangannya mengenai pengalaman penting untuk dilakukan. Karena seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Dewey menganggap bahwa titik tolak dan tujuan dari pendidikan adalah pengembangan pengalaman secara berkelanjutan. Pandangannya mengenai pengalaman banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin (1809-1882) yang menyatakan bahwa dunia berada dalam keadaan terus menjadi. Dengan ini, Dewey ingin menunjukkan bahwa *kondisi ber-"ada" manusia* merupakan suatu proses yang dimulai dari tingkat perkembangan terendah dan terus berkembang menuju tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu kondisi ber-"ada" manusia bukanlah suatu kondisi yang bersifat statis, namun berkembang dan dinamis. Bertolak dari asumsi inilah Dewey merumuskan pengertian, aspek, dan prinsip-prinsip pengalaman.

#### 3.1. Pengertian dan Aspek Pembentuk Pengalaman

Pertama-tama mesti ditekankan bahwa pengalaman dalam kerangka pikir John Dewey berbeda dengan pengalaman dalam pemahaman kaum empiris yang menyatakan bahwa pengalaman adalah hasil penginderaan terhadap entitas partikular yang saling terpisah (Rasyid, 2007, p. 76). Dalam *Experience and Education* Dewey mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan segala situasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkan individu pada upaya kritis refleksif. Ini adalah pengertian pengalaman secara umum.

Pengalaman terbentuk melalui upaya percobaan yang mengantarkan pada konsekuensi, dan berlanjut pada proses berfikir dengan menemukan keterpautan atas

berbagai hal. Oleh karena itu, pengalaman merupakan jalan yang mengantarkan pada pemahaman mengenai dunia. Filsafat instrumentalisme Dewey dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan bergerak kembali menuju pengalaman. Untuk dapat mengolah pengalaman, diperlukan pendidikan yang merupakan media penciptaan dan pengolahan pengalaman yang lebih terawasi, terencana, dan sistematis. Namun, pengalaman bukanlah hal yang maknanya terjelaskan begitu saja. Landasan teoritis mengenai pengalaman dibutuhkan agar pendidikan berdasarkan pengalaman dapat diselenggarakan diatas pengertian dan kriteria pengalaman yang memiliki nilai edukasional.

Pemahaman mengenai pengalaman tercapai dengan menyadari sisi aktif-pasif yang saling bertautan yang membentuk suatu pengalaman. Karena seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pengalaman memiliki pengertian umum sebagai segala situasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkan individu pada upaya kritis refleksif. Pengalaman memiliki sisi aktif berupa upaya seseorang untuk mengadakan percobaan. Upaya ini, dengan melalui serangkaian kondisi tertentu, akan menarik subyek pengalaman kedalam situasi yang merupakan konsekuensi dari upaya percobaan tersebut. Inilah sisi pasif dari pengalaman. Seperti yang dikemukakan oleh Dewey dalam *Democracy and Education*:

*On the active hand, experience is trying – a meaning which is made explicit in the connected term experiment. On the passive, it is undergoing. When we suffer or undergo the consequences. We do something to the thing and then it does something to us in return: such is the peculiar combination. The connection of these two phases of experience measures the fruitfulness or value of the experience. (Dewey, 1916, p. 73).*

Keterpautan sisi aktif dan pasif dari pengalaman akan memberikan nilai pada pengalaman. Misalnya, seorang anak kecil yang bermain dengan pisau lalu tergores bukanlah termasuk dalam kategori pengalaman jika ia tidak merasa sakit sebagai konsekuensinya. Rasa sakit yang ditimbulkan akan mengarahkannya pada

pemahaman bahwa bermain dengan benda tajam berisiko besar untuk tergores dan menuntunnya kepada sikap hati-hati saat berurusan dengan benda tajam.

Maka frase “belajar dari pengalaman” adalah mengkoneksikan apa yang telah dan akan terjadi dalam upaya menjalani suatu percobaan dan konsekuensi dari hal tersebut. Jadi, dapat dikatakan sekali lagi bahwa, pengalaman merupakan jalan yang mengantarkan pada pemahaman mengenai dunia, dengan melakukan upaya percobaan, menjalani konsekuensi, dan menemukan keterpautan atas berbagai hal. Aspek lain yang perlu dibahas ketika membicarakan pengalaman adalah bahwa hal tersebut tidak hanya berlangsung dalam diri atau benak individu. Pengalaman tidaklah berhenti pada tataran mempengaruhi pembentukan sikap, tujuan, dan hasrat pribadi (kondisi internal pengalaman). Sisi aktif pengalaman sampai tingkatan tertentu turut pula mengubah kondisi objektif dari pengalaman.

Dalam keterpautan sisi aktif dan kondisi objektif pengalaman inilah tercipta ruang pertemuan antara individu dengan sosial. Pengalaman tidak hanya berurusan dengan diri individu, tetapi juga berkaitan dengan lingkungannya atau dengan kata lain pengalaman tidaklah berlangsung dalam situasi hampa. Misalnya pengalaman manusia yang berhasil menciptakan teknologi internet telah memungkinkan manusia yang hidup pada saat ini untuk memilah dan mengolah banyak informasi yang sebelumnya tak terjangkau karena masalah kewilayahan.

Kemampuan manusia untuk menjalani pengalaman saat ini merupakan sumbangsih pengalaman-pengalaman manusia sebelumnya yang mengejawantah dalam tatanan sosial dan budaya. Jika aspek ini diabaikan, pengalaman akan dianggap sebagai hal yang hanya berkaitan dengan diri individual. Implikasi dari pemahaman tersebut adalah sekolah tidak memberi perhatian pada aspek-aspek objektif yang dihadirkan dalam kegiatan belajar-mengajar yang mempengaruhi pengalaman pedidik, ataupun sebaliknya. Pengalaman selalu merupakan timbal-balik atas muatan internal maupun eksternal (objektif). Maka, pembentukan kondisi objektif dalam

pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi internal pedidik agar menghasilkan interaksi yang mendorong perkembangan diri individual.

### 3.2. Prinsip-Prinsip Pengalaman

Dewey menekankan bahwa keutamaan pengalaman bukanlah terletak pada daya kognitif yang dijadikan fokus belajar dalam pendidikan tradisional, tetapi pada kemampuan untuk mempertautkan sisi aktif dan pasif pengalaman. Oleh sebab itu, penentuan prinsip-prinsip dalam pengalaman dalam hal ini diperlukan demi memilah dan menentukan pengalaman yang memiliki kelayakan edukasional. Prinsip-prinsip pengalaman ini dirumuskan dengan mengacu pada landasan teoritis pengalaman yang telah pula dijabarkan pada sub-bab sebelumnya dan akan kembali ditegaskan dalam sub-bab ini.

Prinsip pertama yang dikemukakan Dewey adalah prinsip pengalaman yang berkelanjutan atau *continuity of experience*. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa pengalaman mengambil sesuatu dari apa yang sudah diperoleh sebelumnya sekaligus mengubah sesuatu dalam kualitas pengalaman yang akan datang. Berlangsungnya prinsip ini dalam pengalaman dipengaruhi oleh mutu pengalaman yang dijalani. Oleh sebab itu prinsip pengalaman berkelanjutan juga akan bekerja diwilayah pengalaman yang menghambat atau bahkan menghentikan perkembangan mutu pengalaman itu sendiri. Misalnya, kondisi dan pola asuh sedemikian rupa yang membentuk individu dengan pribadi yang manja akan menghambat perkembangan kedewasaannya. Prinsip keberlanjutan pengalaman sebagai pribadi yang manja berjalan dengan membatasi atau menghentikan kemampuan untuk meneruskan pertumbuhan diri.

Prinsip pengalaman berkelanjutan ini didasarkan pada pola kebiasaan yang ditafsirkan secara biologis. *This principle — continuity of experience— rests upon the fact of habit* (Dewey, 1938, p. 35). Kebiasaan atau *habit* dapat dipahami sebagai akumulasi pengalaman yang memodifikasi pengalaman yang tengah dijalani.

Modifikasi ini akan turut mempengaruhi mutu pengalaman berikutnya. Kebiasaan meliputi pembentukan sikap-sikap baik dalam tataran mental maupun intelektual. Pengalaman yang dimengerti sebagai segala situasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkan individu pada upaya kritis refleksif, mengartikan bahwa prinsip pengalaman yang berkelanjutan akan berjalan dalam lingkup ruang dan waktu.

Konsep ini bertalian dengan paham posmodern yang menyepakati bahwa ilmu pengetahuan tidak lagi bersifat metafisis, transendental, dan universal namun bersifat kontekstual dalam lingkup ruang dan waktu tertentu (Achyar, 2010, p 32). Ini merupakan konsep sentral dalam filsafat yang menolak transendentalisasi epistemologi, yaitu obsesi untuk mencari satu fondasi kebenaran valid, yang berkembang di era modern. Rorty memahami ilmu pengetahuan sebagai rangkaian deskripsi tentang dunia yang memiliki konsekuensi praktis. Jadi, penilaian kebenaran tidak lagi dilandaskan pada validitas absolutnya, namun pada nilai gunanya yang bersifat kontekstual dalam lingkup ruang dan waktu.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab 2, penilaian kebenaran yang didasarkan pada nilai guna merupakan kebenaran dalam paham pragmatis. Dewey menempatkan pragmatisme lebih dari sekedar seperangkat pemahaman yang mesti diingat dan diikuti. Pragmatisme Dewey banyak dipengaruhi oleh Pierce. Charles Sanders Pierce adalah seorang filsuf dan ahli logika dari Amerika yang membuahkan pemikiran tentang semiologi atau ilmu tentang tanda. Tidak seperti Saussure yang memahami tanda secara dikotomis (petanda dan penanda) dan struktural (terletak di belakang sistem dan konvensi yang memungkinkan makna), bagi Pierce model tanda bersifat trikotomis atau triadik dan sama sekali tidak memiliki ciri struktural (Hoed, 2002, p. 21).

Prinsip dasarnya adalah tanda bersifat representatif atau mewakili sesuatu yang lain diluar tanda itu sendiri. Proses pemaknaan tanda mengikuti hubungan tiga titik yaitu *representament* (R) bagian tanda yang dapat dipersepsi secara fisik atau

mental, *object* (O) yaitu apa yang diwakili oleh R, dan *Interpretant* (I) atau yang melakukan proses penafsiran hubungan antara R dengan O. I akan melahirkan pemaknaan tanda melalui suatu proses kognitif dan bukan pemahaman atas sebuah struktur. Hal ini disebut sebagai proses semiosis. Makna tanda kemudian menjadi R dan proses triadik tanda kembali berulang.

Melalui proses triadik tanda, Pierce mengungkapkan bahwa dalam makna tanda terangkul *both "natural" and "conventional" signs of all kind* (Cobley, 1997, p. 36). Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan melalui gerak rasio kognitif memiliki latar kultural dan biologis. Dapat dikatakan jika Dewey menafsirkan pemikiran mengenai pola pemaknaan tanda Pierce ini sebagai *pengalaman*. Diawali oleh pemahaman manusia sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Dalam proses tumbuh dan berkembangnya, manusia tidak akan dapat terlepas dari lingkungannya. Pemahaman mengenai kemanusiaan tidak semata-mata diperoleh melalui kesadaran transendental tentang diri namun juga melalui hubungan dialektisnya yang tak terelakkan dengan lingkungan, inilah gerbang awal menuju pengalaman. Proses dialektika ini kemudian membawa subjek kepada tahap selanjutnya dalam pengalaman yaitu pemaknaan reflektif. Ide kemudian lahir sebagai hasil dari upaya reflektif individu terhadap kondisi interaksi antara berbagai elemen yang membentuk pengalaman (Wingo, 1975, p.182).

Ide yang dilahirkan oleh proses refleksi ini akan memberi arah bagi individu untuk bertindak dan jalan untuk memecahkan permasalahan. Ide ini yang pada akhirnya akan merubah karakter situasi (Wingo, 1975, p. 186). Karakter situasi ini nantinya akan kembali menjadi pola kebiasaan yang membutuhkan penyesuaian dalam upaya adaptatif manusia dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, dapat dikatakan jika Dewey mengenakan pola tanda Pierce yang triadik dalam pola hubungan antara manusia-lingkungan-dan pikiran reflektif.

Dewey juga mengikuti James yang mengungkapkan bahwa rasio kognitif bukanlah sesuatu yang telah terberi dan melekat dalam diri manusia, namun sesuatu

yang dicapai melalui upaya yang didasarkan atas tujuan tertentu. Karena hubungannya dengan lingkungan yang membuat pikiran menjadi ada, maka pikiran tidaklah berdiri sendiri namun memiliki fungsi untuk dilaksanakan dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Inilah tujuan dari rasio kognitif. Dengan demikian ide-ide pengetahuan bukan ditekankan pada penilaian benar atau salah, namun pada azas manfaatnya pada permasalahan hidup manusia. Bagi Pierce, yang penting adalah bagaimana pengaruh sebuah ide dalam tindakan. Pada akhirnya, pengetahuan akan bersifat dinamis karena selalu mengalami penyesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang memantulkan hakekat alam (Peursen, 1980, p. 34-35).

Melalui penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman merupakan hubungan timbal-balik antara faktor internal dan eksternal pengalaman. Kondisi ini disebut sebagai situasi. Konsep situasi ini tidak dapat dipisahkan dari konsep interaksi atau hubungan timbal-balik antara faktor internal dan eksternal pengalaman.

Inilah prinsip kedua dalam pengalaman, *interaksi*. Manusia akan selalu hidup dalam serangkaian situasi. Situasi memuat unsur internal dan objektif pengalaman. Suatu pengalaman berjalan berdasarkan atau diarahkan oleh interaksi yang berjalan dalam situasi. Yaitu interaksi antara individu dengan lingkungannya yaitu objek atau individu lain. Lingkungan secara khusus ditekankan Dewey sebagai segala kondisi yang terlibat interaksi dengan kebutuhan, hasrat, tujuan, dan kemampuan personal untuk menciptakan pengalaman (Naomi, 1999, p. 251). Lingkungan bisa berupa cuaca, paham yang berkembang di suatu wilayah, individu-individu yang terlibat percakapan, dan bahkan subjek pembicaraan.

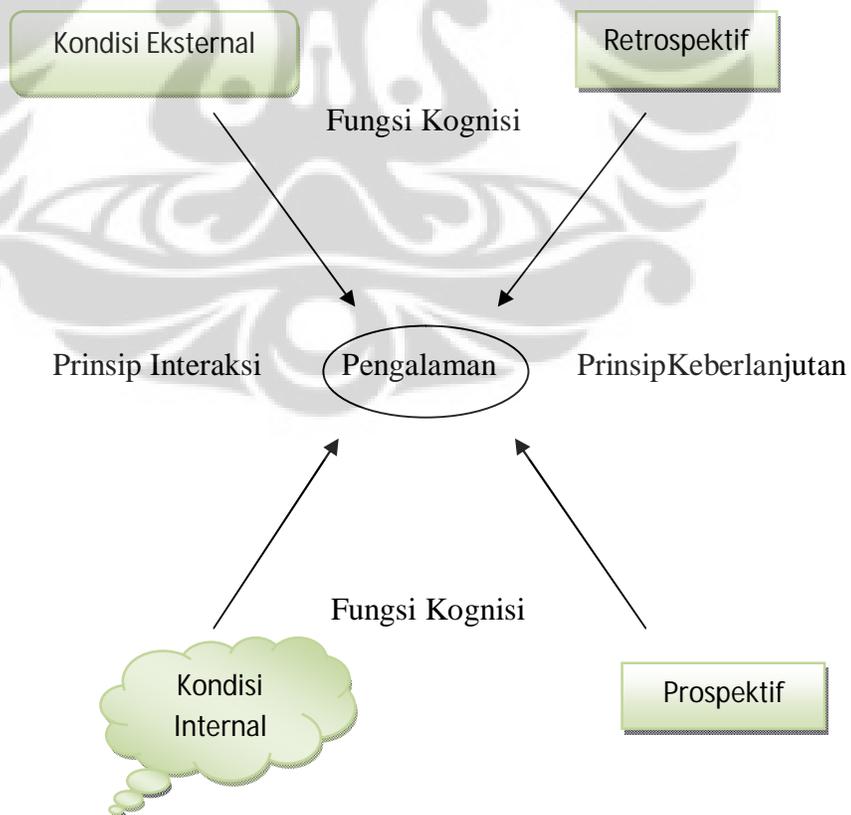
Keutuhan pengalaman tidaklah tercapai dalam kondisi lingkungan yang memaksa diri untuk mensubordinasikan kondisi-kondisi objektif pada apa yang berlangsung didalam diri individu yang menjalani pengalaman atau sebaliknya. Menurut Dewey, kondisi internal dan objektif pengalaman mestilah ditata sedemikian

rupa sehingga diperoleh hubungan timbal-balik yang mendorong individu pada pencapaian pengalaman yang utuh.

Dalam menafsirkan pengalaman dalam fungsi dan daya pendidikan, prinsip interaksi akan memberikan wilayah yang setara pada faktor eksternal dan internal dalam pengalaman. Dalam penerapan prinsip pengalaman yang berkelanjutan, tugas pendidik adalah menata lingkungan pendidikan (kondisi-kondisi apapun yang terlibat interaksi dengan kebutuhan, hasrat, tujuan, dan kemampuan personal untuk menciptakan pengalaman) yang mampu memunculkan suatu jenis interaksi agar kondisi-kondisi internal dan eksternal bisa terjalin. Prinsip keberlanjutan dan prinsip interaksi kemudian saling bertemu. Karena situasi silih berganti, namun selalu akan terdapat jejak situasi terdahulu disituasi mendatang. Pengetahuan yang diperoleh pada situasi terdahulu akan membentuk cara pandang individu dalam memahami situasi berikutnya. Pertemuan aktif antara prinsip keberlanjutan dan interaksi ini yang kemudian akan menyediakan mutu edukatif pengalaman, yang mana mutu tertingginya adalah hasrat untuk terus belajar.

### Bagan Nilai Edukatif dalam Pengalaman

**Keterangan:** Aspek internal merupakan potensi mental dan psikologi individual. Aspek eksternal merupakan lingkungan di luar diri. Prinsip interaksi akan memberikan kemungkinan bagi individu untuk mengejawantahkan fungsi kongkrit dari potensi-potensinya. Melalui pengalaman, kemampuan intelektual akan menjalankan fungsi sebagai penghubung antara *means* dengan *ends*, atau sarana dengan tujuan. Penyatuan aktif prinsip keberlanjutan dan interaksi pada akhirnya akan menyediakan nilai edukatif pengalaman.



### 3.3. Pengalaman sebagai Naturalisasi Epistemologi

Hal yang dapat disimpulkan dari penjabaran Dewey mengenai pengertian, prinsip, dan kriteria pengalaman adalah bahwa *pertama*: tidak ada subjek yang transendental. Manusia berada di dunia dan selalu terkait dengan (terpengaruh dan mempengaruhi) dunianya. Dengan demikian, Dewey tidak menerima kebenaran korespondensi atau representasi. Pengetahuan yang dihasilkan akan selalu tersalurkan melalui persepsi. Oleh sebab itu, dalam upayanya memperoleh pengetahuan, manusia tidak akan bisa mencapai sudut pandang di luar dunia atau terbebas dari konteks sosial budayanya (Putnam, 1981, 50). Hal ini kemudian ditegaskan oleh Rorty, bahwa realitas yang kita amati adalah realitas yang telah kita bingkai, sehingga telah termanipulasi (Rorty, 1991, 29).

*Kedua*, rasio kognitif bukanlah sesuatu yang telah terberi dan melekat dalam diri manusia, namun sesuatu yang dicapai melalui upaya yang didasarkan atas tujuan tertentu. Karena hubungannya dengan lingkungan yang membuat pikiran menjadi ada, maka pikiran tidaklah berdiri sendiri namun memiliki fungsi untuk dilaksanakan dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan, inilah tujuan dari rasio kognitif. Dengan demikian ide-ide pengetahuan bukan ditekankan pada penilaian benar atau salah, namun pada azas manfaatnya pada permasalahan hidup manusia.

*Ketiga*, karena eksistensi manusia, bahasa, dan lingkungannya bersifat kontingen, maka manusia tidak akan pernah mencapai totalitas pengetahuan.

*Keempat*, Dewey menolak kesatuan metode dan bahasa ilmiah Ilmu pengetahuan yang lahir dari anggapan bahwa rasio dan empiri dapat menggambarkan realitas alam secara akurat. Pengetahuan merupakan kesepakatan mengenai apa yang dianggap sebagai kebenaran. Apa yang disepakati sebagai kebenaran ini dijabarkan sebagai serangkaian deskripsi tentang dunia yang memiliki kegunaan praktis. Ini merupakan kebenaran dalam pengertian pragmatis. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan tidak dapat diberlakukan secara final dan universal.

*Kelima*, pengertian, prinsip, dan kriteria pengalaman yang disusun oleh Dewey merupakan reaksi kerasnya terhadap kaum empiris dan rasionalis yang telah memecah unsur-unsur pengalaman ke dalam kotak-kotak yang tak saling terhubung demi menemukan dasar pengetahuan yang pasti dan membangun sistem keyakinan atas kebenaran.

*Keenam*, kesimpulan-kesimpulan diatas juga sekaligus merupakan penolakan terhadap pemahaman atas epistemologi dalam pandangan fundasionalis. Oleh pandangan ini, epistemologi ditugaskan untuk dapat menjelaskan realitas secara tepat. Rasio dianggap mampu mencerminkan realitas secara murni dan oleh karena itu pengetahuan yang dihasilkan bernilai objektif. Bahasa kemudian diobjektifikasi agar mampu merepresentasikan hasil olah rasio yang objektif. Dengan demikian bahasa disejajarkan dengan realitas. Dewey berkesesuaian dengan Wittgenstein yang menolak diperolehnya makna universal karena nyatanya penggunaan bahasa tidak merepresentasikan prinsip-prinsip yang universal (Wittgenstein, 1953, p. 76).

Bahasa terdiri atas kalimat yang maknanya tergantung pada penyusunan dan pembongkaran kosakata yang terus berkelanjutan. Bahasa dengan demikian memiliki banyak bentuk. Hal ini ditegaskan oleh Rorty, bahwa makna bahasa tidak dinilai berdasarkan ketepatannya melainkan menurut kebergunaannya, atau dengan kata lain makna merupakan produk dari situasi yang terkait. Penyusunan dan pembongkaran kosakata tidak berkaitan dengan penemuan yang lebih benar, namun didasarkan atas pertimbangan bahwa realitas harus dideskripsikan kembali sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya (Rorty, 1989). Diri memiliki hubungan dialektis yang tak terelakkan dengan lingkungannya —termasuk bahasa. Oleh sebab itu, bahasa turut membentuk diri dalam tataran kognisi. Diri kemudian juga turut menjadi produk dari kosakata yang bersifat kultural.

*Ketujuh*, pengalaman yang diposisikan sebagai sumber pengetahuan merupakan bentuk naturalisasi epistemologi. Naturalisasi epistemologi merupakan penolakan terhadap fundasionalisasi epistemologi dengan menyatakan bahwa

manusia dan lingkungannya bersifat kontingen dan oleh karena itu pengetahuan tidak akan pernah mencapai totalitasnya. Metode pencapaian pengetahuan tidak didasarkan pada suatu pendasaran yang valid atau menolak kebakuan epistemologi, namun mengacu pada pengalaman tiap individu yang secara alamiah bersifat kontingen.



## BAB 4

### UJIAN NASIONAL:

#### REPRESENTASI ABSOLUTISME EPISTEMOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Berdasarkan Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menetapkan standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab IX pasal 35 ayat 1, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala<sup>1</sup>.

Penetapan standar penyelenggaraan pendidikan ini berkaitan dengan diselenggarakannya muatan kurikulum yang desentralistik<sup>2</sup>. Penyelenggaraan kurikulum yang tak lagi sentralistik dikontrol melalui serangkaian ketetapan standar. Anak didik, sekolah, dan pemerintah daerah yang otonom, diharapkan mampu berkerja sama dalam menciptakan dan menjalankan suatu sistem pendidikan yang memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan oleh negara. Ujian Nasional (UN),

---

<sup>1</sup> Dalam penjelesan mengenai UU Sisdiknas (1) Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (2) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. (3) Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

<sup>2</sup> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan pusat kewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan.

pada akhirnya dilaksanakan dalam rangka menguji standar perkembangan diri peserta didik dan kelayakan edukasional setiap sekolah dalam skala nasional.

UN diselenggarakan oleh BSNP atau Badan Standardisasi Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>3</sup>. BNSP merupakan mitra Depdiknas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang dilakukan melalui standardisasi nasional pendidikan. Pada mulanya penyelenggaraan UN ditujukan sebagai acuan data statistik mengenai kemampuan daya kognitif siswa didik untuk pemetaan mutu pendidikan. Namun, nyatanya UN justru dijadikan patokan kompetensi siswa, guru, dan sekolah (Kartono, Kompas 17 Mei 2006). Inilah blunder penyelenggaraan UN yang berdampak pada berbagai permasalahan pendidikan<sup>4</sup>.

Salah satu penyebab blunder penyelenggaraan UN adalah ketidak-jelasan landasan hukum penyelenggaraannya. Komisi X (komisi antara DPR dan Depdiknas) DPR RI tahun 2005 pada saat itu sebenarnya mendesak agar penyelenggaraan UN dihentikan karena disinyalir tidak berkesesuaian dengan Pasal 58 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas —mengenai evaluasi hasil belajar peserta didik yang semestinya dilakukan oleh pendidik/guru.

Isi dalam UU tersebut sesuai dengan prinsip pedagogi berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana guru yang mengetahui kompetensi siswa dan oleh sebab itu penentuan kelulusan siswa didik hanya dapat ditentukan oleh pendidik dengan mempertimbangkan tiga unsur yaitu: unsur afektif, psikomotorik, dan kognitif. Desakan tersebut ternyata diabaikan oleh Depdiknas. Atas dasar tersebut Komisi X DPR RI mengundang Mendiknas untuk mengadakan rapat kerja khusus membahas UN pada Kamis, 11 Mei 2006. Meskipun banyak fraksi menolak

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2005 menyebutkan, “Pada Tahun Pelajaran 2005/2006, Badan Standardisasi Pendidikan Nasional (BNSP) menyelenggarakan UN untuk mata pelajaran tertentu yang diikuti oleh peserta didik SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK da MAK”.

<sup>4</sup> Salah satu contohnya adalah standar kuantitatif yang diberlakukan dalam UN sebagai syarat kelulusan menjadi determinasi keras atas kriteria perkembangan diri peserta didik, yang memiliki keragaman latar belakang dan keunikan tersendiri.

penyelenggara UN, dalam rapat ini disepakati bahwa UN tetap dilaksanakan pada 16-18 Mei 2006 untuk SLTA dan 23-25 Mei 2006 untuk SLTP.

.Pelaksanaan UN tahun 2006 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagai pelaksanaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dikeluarkannya PP No 19/ 2005 tentang Standardisasi Nasional Pendidikan (SNP) yang diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan UN ini ternyata justru mengundang masalah baru. Pasalnya, pasal-pasal dalam PP yang mengatur UN bertentangan dengan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, bahkan terdapat pasal yang saling kontradiktif dalam PP itu sendiri.<sup>5</sup>

Blunder yang muncul di wilayah hukum perihal landasan penyelenggaraan UN, memperlihatkan bahwa acuan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini tidak merepresentasikan apapun selain permasalahan intern bidang kajian hukum itu sendiri. Sebaliknya, karena penyelenggaraan UN saat ini dipraktekan sebagai standar kompetensi guru dan kelulusan siswa —dengan mengesampingkan

---

<sup>5</sup> **Pertentangan dengan Sisdiknas:** *PP No 19/ 2005* bertentangan dengan *Pasal 58 UU Sisdiknas*. Pasal ini memberikan otoritas kepada pendidik untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tetapi pasal 67 *PP No 19/ 2005* menyatakan bahwa: (1) Pemerintah menugaskan BNSP untuk menyelenggarakan UN yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur non formal kesetaraan; (2) Dalam menyelenggarakan UN BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan; (3) Ketentuan UN diatur lebih lanjut dengan PM. Dengan demikian, otoritas pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik ada pada Menteri Pendidikan dengan bantuan BSNP.

**Pertentangan antar pasal:** *Pasal 66 ayat 1* menyatakan: Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 63 Ayat 1 butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk UN. Dalam pasal ini UN dijabarkan bahwa tujuan diselenggarakannya UN adalah untuk menilai kompetensi lulusan. Namun *pasal 68* menyatakan bahwa: Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (a) pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan; (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/ atau satuan pendidikan; (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kontradiksi tujuan penyelenggaraan UN terlihat dimana pasal 66 menyatakan bahwa UN ditujukan sebagai penilai pencapaian kompetensi lulusan, namun pasal 68 butir c UN justru ditujukan sebagai penentu kelulusan peserta didik.

landasan hukumnya, maka UN dapat merepresentasikan unsur-unsur pendidikan yaitu; tujuan, prinsip, metode, landasan ideologis, relasi kuasa, pola komunikasi, serta kerangka epistemologis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam skala nasional.

#### **4.1. Analisis Praktek Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia**

Metode yang digunakan dalam menganalisa representasi unsur-unsur pendidikan dalam praktek penyelenggaraan UN dalam skripsi ini didasarkan pada aspek dan prinsip pengalaman dalam konsepsi pendidikan demokratis John Dewey yang bertolak dan menuju pengalaman. Dalam skripsi ini analisa praktik penyelenggaraan UN akan menunjukkan terdapat satu konsepsi wacana tertentu yang menggerakkan penyelenggaraannya.

Foucault adalah seorang pemikir abad ke-20 asal Prancis yang memperkenalkan hubungan antara wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. Karyanya *Les mots et les choses* (1966) dan *L'archeologie du savoir* (1969), memperlihatkan kedekatan pemikiran Foucault dengan strukturalisme. Strukturalisme merupakan pendekatan yang memandang gejala budaya sebagai suatu struktur yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Bagi kaum strukturalis, praktik sosial selalu didasari oleh struktur fundamental yang tak nampak karena beroperasi di alam bawah sadar manusia.

Dalam karyanya Foucault memperkenalkan istilah *episteme* yang dijabarkan sebagai suatu struktur pengetahuan atau wacana. Para pemikir strukturalis memahami struktur sebagai suatu totalitas. Sebagai struktur, *episteme* dapat dipahami pula sebagai totalitas. Yaitu sebagai totalitas yang menyatukan dan mengendalikan cara pandang manusia dalam memahami realitas (Foucault, 1969, p. 56). Menurut Foucault, *episteme* tidak dapat dilacak, tetapi dapat ditemukan melalui pengungkapan apa yang dianggap *tabu*, *gila*, atau *tidak benar* dalam suatu rentang zaman tertentu.

Foucault menjabarkan bahwa di dalam *episteme* terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan realitas. Bahasa bukanlah cermin realitas karena ditentukan oleh *episteme*. Realitas yang disampaikan bahasa dengan demikian merupakan realitas

bentukan *episteme*. Hal ini berarti, bahasa merupakan wacana atau stuktur pengetahuan tertentu. Menurut Foucault, wacana mewujud dalam aturan-aturan dan praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu.

Menurut Foucault, wacana berperan dalam kajian ilmiah —yang ditekankan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan— sebagai kuasa simbolik yang melegitimasi nilai kebenaran. Dunia intelektual dengan demikian bukanlah dunia yang sepenuhnya netral karena merupakan dunia pertarungan wacana. Karena legitimasi nilai kebenaran pada akhirnya akan ditentukan oleh wacana yang memenangkan pertarungan. Konsepsi wacana yang diteliti pada akhirnya ditujukan untuk memperlihatkan landasan epistemologi dalam praktek pendidikan di Indonesia.

#### **4.2. Wacana Positivisme dalam Penyelenggaraan UN**

Tulisan dalam sub-bab ini akan mencoba menjabarkan bahwa UN merupakan representasi dari pelaksanaan sistem pendidikan yang berlandaskan paradigma positivistik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

(1) Tipe soal dalam UN yang berupa pilihan ganda —dimana hanya terdapat satu jawaban yang benar—merupakan wujud dari *asumsi adanya kebenaran korespondensial dan universal*. Yaitu bahwa hanya ada satu wujud pengetahuan yang bernilai valid, mengacu pada realitas yang sebenarnya, dan berlaku secara general.

(2) Keyakinan akan adanya satu bentuk pengetahuan yang pasti dan bersifat universal merupakan *pengkonstruksian realitas dalam narasi positivistik*. Yaitu narasi yang memandang realitas sebagai fenomena yang teratur, terukur, dan pasti, karena tunduk pada hukum-hukum alam. Hal ini terlihat dari penyederhanaan standar perkembangan diri ke dalam penilaian kuantitatif. Perkembangan diri dianggap sebagai suatu kondisi yang teratur dan pasti sehingga dapat disederhanakan dalam kategori-kategori numeral.

(3) Penilaian kuantitatif merupakan upaya *mengkomunikasikan pengetahuan melalui bahasa universal*, yaitu melalui bahasa matematis. Ini merupakan upaya paradigma positivisme logis dalam memperoleh pengetahuan yang objektif dan

universal dengan menyusun dan menggunakan struktur bahasa yang mampu merumuskan semua ungkapan ilmu pengetahuan ke dalam simbol-simbol universal.

#### 4.2.1. Asumsi Kebenaran Korespondensial dan Universal

Paradigma positivisme logis merupakan pandangan yang mengakui adanya satu teori yang berkorespondensi dengan realitas. Pandangan ini juga memiliki asumsi bahwa realitas dapat digambarkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kehendak-kehendak subjektif model apapun. Semangat positifistik dalam upaya mencapai pengetahuan mulai bergelora berkat kemunculan Descartes. Ia menjelajahi problema-problema mendasar dalam pemikiran dan pengetahuan demi menjawab pertanyaan mengenai *“Bagaimana saya dapat mengetahui sesuatu, dan bagaimana pengetahuan tentang hal tersebut dapat dipastikan?”*

Dalam memahami jawaban Descartes atas pertanyaan tersebut, dapat dimulai dengan mengetahui bahwa satu-satunya model pengetahuan yang jelas dan pasti baginya adalah Matematika. Karena menurutnya model pengetahuan ini memiliki langkah-langkah pasti yang menuju ke kesimpulan yang juga tidak terbantahkan. Maka setiap upaya mencapai pengetahuan haruslah melewati metode matematis yang deduktif, yaitu berangkat dari asumsi kebenaran yang paling abstrak, umum, sederhana, jelas, dan pasti menuju ke asumsi kebenaran yang lebih rumit. Melalui metode ini kepastian pengetahuan akan terlahir dengan sendirinya.

Penalaran Descartes yang matematis deduktif ini mengutamakan esensi sebagai patokan kebenaran. Esensi merupakan kebenaran yang bersifat intrinsik, melekat pada dirinya sendiri, dan tidak dapat terpengaruh oleh kondisi diluar dirinya. Misalnya mengenai esensi manusia yang diasumsikan oleh Descartes. Ia pertamanya menolak ketubuhan sebagai sumber pengetahuan yang valid. Karena ketubuhan manusia hanya dapat menangkap event dan bukan esensinya serta seringkali menipu. Lilin yang terbakar tidak lagi berbentuk seperti semula, lalu apakah benda tersebut masih dapat disebut sebagai lilin? Apa yang menyebabkan benda tersebut tetap dapat

disebut sebagai lilin? Selain itu ketubuhan manusia merupakan sesuatu yang aksidental yang pertumbuhannya bergantung pada lingkungan dan pengaturan gerakannya berpusat pada pikiran. Dengan kata lain tubuh manusia adalah raga yang kosong dan sepenuhnya bergantung pada pikiran.

Descartes menuturkan bahwa ia dapat saja membayangkan atau memikirkan *diri*-nya yang tanpa tubuh, namun tak dapat membayangkan atau memikirkan dirinya yang tanpa pikiran. Ketika yang tersisa dari dirinya adalah pikiran, ia pun masih meragukan bahwa ia tengah berpikir. Namun keraguan ini menyisakan satu hal yang esensial, yaitu keraguan itu sendiri. Lebih lanjut, keraguan ini selalu bersumber dari dalam diri yaitu *saya yang sedang meragukan atau menyangsikan sesuatu*. Maka esensi manusia adalah kemampuannya untuk meragu. Manusia ada atau hadir dalam dunia ketika ia meragukan sesuatu. Penjabaran ini disederhanakan oleh Descartes dalam satu dalil *cogito ergo sum*.

Hal yang esensial adalah hal yang jernih dan tegas. Bagi Descartes kejernihan dan ketegasan adalah model proses berfikir yang ideal; yang akan melahirkan pengetahuan yang pasti dan tak terbantahkan. Oleh karena itu, upaya pencapaian kebenaran mesti terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektif. Hal ini dimungkinkan karena esensi manusia, yaitu kemampuannya untuk meragukan atau menyangsikan, bersifat kosong, netral, dan objektif. Sehingga mampu melakukan penalaran yang bebas nilai terhadap suatu hal.

Selain berangkat dari penalaran Cartesian yang matematis deduktif, model penalaran positifistik juga berangkat dari paradigma Galilean yang berpendapat bahwa alam semesta pada hakekatnya adalah himpunan fenomena yang saling terhubung secara interaktif namun terbatas dan mekanis (Wignjosoebroto, n.d. p. 2). Maka dari itu, suatu fenomena pastilah merupakan suatu penyebab atau akibat dari fenomena yang lain. Kausa sebab-akibat ini merupakan suatu yang tak terbantahkan karena berangkat dari penalaran yang jernih dan tegas mengenai keberlangsungan alam semesta yang terlepas dari kehendak-kehendak subjektif.

Positivisme logis secara otomatis memposisikan dirinya sebagai satu-satunya fundasi pengetahuan yang valid karena hanya pandangan ini yang dianggap mampu menghasilkan pengetahuan yang bersifat korespondensial dan representasional — yaitu pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara objektif dan universal.

Praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan ideologi positivistik menganggap kajian ilmiah sebagai proses pembelajaran yang paling tepat bagi perkembangan kedirian. Kajian ilmiah merupakan kajian yang menekankan bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan adalah pengetahuan yang bukan diturunkan dari dunia pengalaman, melainkan dunia pikiran. Dunia pikiran yang dimaksud disini ialah dunia yang berisi kerja-kerja rasional, logis, dan empiris. Oleh karena itu kajian ilmiah menekankan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang tegas dalam mencapai pengetahuan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai sesuatu yang *a-priori*. Yaitu prinsip yang telah tertanam secara tegas, jelas, dan pasti dalam pikiran manusia. Jalan untuk menggapai prinsip-prinsip ini tidak dicapai melalui pengalaman, tapi penalaran. Bahkan pengalaman dianggap hanya dapat dimengerti bila ditinjau melalui prinsip-prinsip ini.

Dalam rasionalitas Plato, indera manusia yang menangkap realitas-realitas empirik merupakan penguat dan perangsang ingatan yang membawa kesadaran terhadap pengetahuan yang telah ada dalam pikiran. Hakekat kenyataan menurut Plato, terdiri dari idea-idea. Bentuk-bentuk idea ini dapat diketahui lewat proses intuisi rasional. Maka segala pengetahuan hanya akan dicapai lewat proses pemikiran rasional yang teratur. Kaum rasionalis yang menekankan kajian ilmiah sebagai upaya pencapaian pengetahuan yang paling valid ini kemudian berpendapat bahwa dunia yang nyata hanyalah dunia yang diketahui lewat metode intuisi rasional. Oleh karena itu, kebenaran atau kesalahan hanya dapat dikenakan kepada ketidakteraturan jalan pikir, dan bukan pada unsur-unsur diluar hal tersebut.

Pada akhirnya, dalam penyelenggaraan pendidikan berpaham positivistik, yang disebut sebagai perkembangan diri terbatas pada perkembangan intelektualitas.

Karena ide positivistik menempatkan kerja tubuh dan emosi —unsur yang juga terkandung dalam kemanusiaan— tersentralisir di dalam kerja intelektualitas. Metode pengajaran dalam praktek pendidikan positivistik pun bersifat satu arah dengan tidak mempertimbangkan pengalaman individual sebagai perihai yang turut mempengaruhi perkembangan diri tiap individu.

#### **4.2.2. Konstruksi Realitas dalam Narasi Positivistik**

Pandangan positivistik berobsesi untuk memperoleh pengetahuan objektif mengenai realitas dengan mendasarkan pada asumsi bahwa: (1) manusia adalah subjek yang rasional dan *ahistoris*, (2) realitas terkonstruksi secara objektif, (3) melalui potensi kognitifnya, manusia mampu mencapai pengetahuan mengenai realitas secara objektif. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari proses penalaran positivistik dianggap bersifat korespondensial dan universal. Melalui asumsi ini realitas telah direpresentasikan dalam narasi yang positivistik. Realitas diakui sebagai suatu kondisi yang tidak terkait dengan subjektivitas manusia. Manusia tidak diposisikan sebagai subjek yang historis atau terkait dengan kesejarahannya.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menempatkan soal-soal yang diujikan dalam UN sebagai fakta-fakta dan pengetahuan objektif yang mesti dikuasai dengan baik karena hal tersebut dianggap sebagai realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kegagalan dalam menempuh UN dianggap sebagai kegagalan dalam memahami realitas.

#### **4.2.3. Komunikasi Pengetahuan melalui Bahasa Universal**

Ilmu merupakan usaha untuk menyusun lambang dan sistematika dari abstraksi yang dituangkan dari pengalaman (Suriasumantri, 1978, p. 212). Upaya paradigma positivistik logis dalam memperoleh pengetahuan yang objektif dan

universal adalah dengan menyusun struktur bahasa yang dapat merumuskan semua ungkapan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa dasariah yang mengungkapkan pengalaman-pengalaman elementer manusia (Kaelan, 1998, p. 134).

Matematika memberikan suatu sistem simbol yang secara tepat mampu mengkomunikasikan pengetahuan dan bahkan menyusun pengetahuan baru. Oleh karena itu model berfikir matematika oleh positivisme logis digunakan sebagai model berfikir yang valid dalam penyelidikan keilmuan dan menemukan model pengetahuan baru. Habermas menjabarkan bahwa terdapat apa yang disebut “pemahaman monologis tentang bahasa”, yaitu pemahaman yang menegaskan hubungan faktual antara bahasa dengan makna. Model bahasa yang tercakup dalam pemahaman tersebut oleh Habermas disebut sebagai “bahasa murni”, yang diantaranya adalah bahasa simbol. Simbol-simbol merupakan bahasa yang pemahaman atasnya dijabarkan secara definitif dan terstruktur.

Dalam ilmu bahasa, bahasa dijabarkan sebagai suatu sistem simbol yang memiliki makna dan pengertian makna (Kaelan, 1998, p. 222). Pengertian makna ini akan selalu mengacu pada suatu fakta atau peristiwa. Karena tidak akan terwujud suatu bahasa yang hanya dimaksudkan sebagai serangkaian bunyi yang tidak bermakna. Sistem simbol dalam bahasa merupakan struktur yang mengatur rangkaian hubungan antar simbol sehingga bahasa mampu mengkomunikasikan suatu fakta. Dengan demikian, pemahaman mengenai fakta merupakan pemahaman yang diperoleh melalui analisa hubungan antar simbol dalam bahasa. Dengan kata lain, analisa mengenai fakta dapat dilakukan melalui analisa struktur simbolik dalam bahasa.

Model berfikir matematis memiliki sifat-sifat yang memungkinkannya mendapatkan peran yang penting dan menjadi alat komunikasi utama dalam ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. Matematika merupakan bentuk logika paling tinggi yang diciptakan oleh pemikiran manusia. Logika ini dijabarkan dalam bentuk sistem simbolis dari

kegiatan pemikiran serta struktur yang teratur dari teori bilangan dan ruang (Suriasumantri, 1978, p. 211).

- b. Matematika berhubungan dengan pernyataan yang berupa dalil dan konsekuensinya dimana pengujian kebenaran secara matematis akan dapat diterima secara rasional.
- c. Matematika tidak mendapatkan pengaruh terhadap perubahan ruang dan waktu.
- d. Matematika adalah logika deduktif, yang merubah pengalaman indera kedalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan secara diskriminatif, kemudian bentuk ini dirubah menjadi abstraksi, lalu diperlakukan secara general. Generalisasi yang diberlakukan tidak tergantung pada perubahan wujud fisik karena setiap objek diperlakukan sebagai wujud dari pemikiran abstrak. Sistem matematika terbangun dengan mengaitkan generalisasi dan wujud-wujud abstrak melalui metode deduksi.

#### **4.3. Absolutisme Epistemologis dalam Wacana Positivisme**

Descartes, melalui metode berpikirnya yang rasional deduktif, mencoba menempatkan manusia sebagai pusat epistemologi yang mampu menjadi sumber bagi pengetahuan yang pasti dan menghilangkan keraguan. Karena Descartes meyakini bahwa epistemologi mampu meraih kebenaran transenden yang mengatasi ruang dan waktu serta melintasi keragaman budaya yang dikonstruksi manusia. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan yang objektif, korespondensial, dan universal sehingga diperoleh pengetahuan yang sejati tentang realitas. Rasio yang jernih dianggap sebagai cermin yang mampu memantulkan realitas objektif yang tidak terpengaruh oleh kehendak-kehendak subjektif model apapun. Descartes merupakan filsuf yang mengawali pandangan positivisme logis. Pada perkembangannya positivisme logis selalu berupaya mencari dasar yang valid bagi pengetahuan yang objektif, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar merepresentasikan realitas.

Dewey mengajukan keberatannya pada pandangan positivistik yang menekankan kebenaran korespondensial dan universal. Ia menyebut pandangan ini sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan memposisikan diri sebagai seorang penonton. Karena pandangan ini beranggapan bahwa peneliti merupakan penonton yang dapat meraih sudut pandang yang netral dan transparan dengan menarik diri di luar dunia, yang berada diluar ruang dan waktu (Yusuf, 2010). Pandangan ini terobsesi pada pencapaian hakekat pengetahuan. Obsesi ini, menurut Dewey, memutus hubungan antara pengetahuan dengan manfaat. Padahal, seperti yang telah di jabarkan pada bab dua, aktifitas berfikir disebut Dewey sebagai aktifitas yang dirangsang oleh unsur-unsur dalam pengalaman. Berfikir merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dicerap melalui pengalaman. Oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh melalui aktifitas berfikir menjadi bermakna ketika menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik (Kattsoff, 1986, p 183). Selain itu, kegiatan berfikir dengan demikian akan selalu melibatkan ketertarikan dan potensi diri tiap individu yang unik. Keterlibatan tersebut akan mengarahkan proses pencerapan pengalaman dan aktifitas pengolahannya. Oleh sebab itu, proses berfikir diandaikan Dewey lebih luas dari sekedar aktifitas kognitif.

Ini adalah sikap radikal Dewey dalam memahami pragmatisme. Paham pragmatis yang dapat dirangkum sebagai paham yang menempatkan validitas kebenaran dari suatu proposisi pada konsekuensi yang dihasilkannya (*consequences as a test of the validity of propositions*), telah ditarik sebagai kerangka berfikir. Hal ini berarti, setiap aktivitas berfikir secara alamiah tidak akan dapat menghasilkan nilai-nilai universal dan absolut. Logika formal pun tidak mampu berposisi secara dominan dalam kaidah berpikir. Selain itu, validitas kebenaran juga hanya dapat diletakkan pada nilai guna bagi kepentingan tiap individu, bukan pada objektivitas dan korespondensialitas, dan ide atau pengetahuan yang dihasilkan akan selalu berfungsi sebagai instrumen dalam bertindak.

Sebelum Dewey, Wittgenstein juga telah menolak makna yang universal mampu diperoleh karena fenomena linguistik atau kebahasaan tidak memberikan

prinsip-prinsip yang universal (Wittgenstein, 1953, p. 76). Konsep kebenaran yang diyakini manusia dapat dipahami dan dikomunikasikan ketika telah tersusun dalam suatu tatanan bahasa. Dalam perspektif ini kata dan makna digunakan menurut kebergunaannya dan bukan ketepatannya. Hal ini juga sekaligus menyatakan bahwa kata dan makna bersifat kontekstual atau merupakan produk dari situasi yang terkait dengan kesadaran yang mengkonstruksikan tatanan bahasa tersebut. Oleh karena itu, kebenaran yang disajikan oleh kalimat tidaklah bersifat metafisik. Bahasa merupakan kreasi atas kosa kata dan pemaknaan baru yang terus berlanjut. Menurut Rorty hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa realitas harus dideskripsikan kembali sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Rorty, 1989, p.103). Bahasa bukanlah cetakan utuh dari realitas, namun alat dalam berurusan baik dengan diri, orang lain, dan lingkungan yang melingkupi manusia. Bahasa adalah media dalam menyatakan realitas.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, hal ini ditegaskan oleh Dewey dengan menolak kesatuan metode dan bahasa ilmiah Ilmu pengetahuan yang lahir dari anggapan bahwa rasio dan empiri dapat menggambarkan realitas alam secara akurat. Pengalaman, dinyatakan Dewey, merupakan hubungan timbal balik antara faktor internal dan eksternal pengalaman. Ini disebut Dewey sebagai prinsip kedua dalam pengalaman, yaitu *interaksi*. Kondisi timbal-balik antara berbagai unsur ini disebut sebagai situasi. Konsep situasi ini tidak dapat dipisahkan dari konsep interaksi atau hubungan timbal balik antara faktor internal dan eksternal pengalaman. Manusia akan selalu hidup dalam serangkaian situasi. Situasi memuat unsur internal dan objektif pengalaman. Suatu pengalaman berjalan berdasarkan atau diarahkan oleh interaksi yang berjalan dalam situasi. Yaitu interaksi antara individu dengan lingkungannya yaitu objek atau individu lain. Interaksi tersebut akan memunculkan karakter dan kebutuhan yang berbeda pada tiap individu. Pengetahuan yang dihasilkan pada akhirnya merupakan kesepakatan mengenai apa yang dianggap sebagai kebenaran pada suatu cara hidup tertentu yang dihasilkan oleh interaksi dari unsur-unsur pengalaman ini. Apa yang disepakati sebagai kebenaran ini dijabarkan sebagai serangkaian deskripsi tentang dunia yang memiliki kegunaan praktis yang

bersifat kontekstual. Oleh sebab itu ilmu pengetahuan tidak dapat diberlakukan secara final dan universal.

Pengkonstruksian realitas selalu terkait dengan kebudayaan karena disampaikan melalui bahasa. Karena bahasa selalu digunakan dalam kerangka fungsional, maka kondisi sosial, budaya dan lingkungan akan mempengaruhi penciptaan, penyusunan, dan pemahaman bahasa. Bahasa pada akhirnya akan membentuk cara pandang dan nilai-nilai. Realitas yang terkonstruksi melalui bahasa dengan demikian bukanlah suatu objek atau fakta murni karena objek atau fakta selalu dipahami melalui paradigma, teori, atau kerangka konseptual tertentu yang terbangun dalam kerangka kebahasaan tertentu (Robinson, 2002, p. 55). Oleh karena itu, fundasionalisme dalam ilmu pengetahuan, moralitas, bahasa, dapat dicurigai sebagai upaya untuk melanggengkan wacana tertentu.

Penjabaran diatas memperlihatkan ketidak-mungkinan untuk menjelaskan realitas pada tataran objektif dan absolut seperti yang diupayakan oleh paradigma positivistik karena realitas yang kita teliti adalah realitas yang telah kita bingkai dalam cara pandang tertentu sehingga menjadi realitas yang termanipulasi (Rorty, 1991, p. 106). Kritik terhadap obsesi pencapaian pengetahuan yang objektif dan absolut ini digencarkan karena telah mengabaikan kemungkinan kebenaran lain diluar paradigmanya. Foucault mengungkapkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara ilmu pengetahuan dan kuasa. Subjek digambarkan sebagai hasil ideologi atau konfigurasi epistemologis tertentu. Absolutisme epistemologis yang ditekankan paradigma positivistik bukanlah cerminan objektif mengenai realitas namun upaya paradigma tersebut dalam mempertahankan validitas kebenarannya. Seperti yang diutarakan Dewey, pengalaman akan mengambil sesuatu dari apa yang sudah diperoleh sebelumnya sekaligus mengubah sesuatu dalam kualitas pengalaman yang akan datang. Ini merupakan salah satu prinsip dalam pengalaman yaitu *continuity of experience*.

Melalui penjabaran di atas, saya menyimpulkan bahwa positivisme logis telah memaksakan suatu metode pencapaian pengetahuan yang didasarkan pada satu

pendasaran epistemologi tertentu yang dianggap valid, bukan mengacu pada pengalaman tiap individu yang secara alamiah bersifat kontingen. Oleh sebab itu, *penyelenggaraan UN yang membakukan epistemologi positivistik sebagai satu-satunya metode pencapaian pengetahuan yang dianggap valid, tidak membuka ruang bagi pengalaman yang menjadi titik tolak dan tujuan dalam konsepsi pendidikan demokratis John Dewey.*



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Masalah epistemologi adalah masalah yang selalu bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebenaran pengetahuan. Epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan (Kattsoff, 1986, p. 74). Epistemologi merupakan alur penalaran dalam filsafat yang memastikan kebenaran suatu pernyataan dengan memeriksa koherensi penalarannya, agar sesuai dengan metode atau cara yang mampu menghasilkan pengetahuan yang valid.

Epistemologi lalu menempati posisi yang sangat penting dalam pendidikan. Karena salah satu kepentingan dalam pendidikan adalah transformasi pengetahuan yang merupakan sari pengalaman kemanusiaan yang kompleks, agar peradaban selalu bergerak maju menuju kemanusiaan yang lebih baik. Apakah pengetahuan itu? Bagaimana asal mula pengetahuan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Bagaimana cara memastikan kebenaran dalam pengetahuan? Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan dan menggerakkan tujuan, fungsi, metode, sampai kepada kurikulum pendidikan.

Namun, Dewey mengajukan keberatannya pada metode pencapaian pengetahuan yang menekankan kebenaran korespondensial dan universal. Ia menyebut pandangan ini sebagai upaya memperoleh pengetahuan yang mengandaikan diri mampu meraih sudut pandang yang netral dan transparan dengan menarik diri ke luar dunia (Yusuf, 2010). Melalui penelitiannya yang ketat mengenai berbagai aspek kehidupan mulai dari taraf individu, sosial, dan lingkungan serta relasi diantaranya, Dewey lalu memilih untuk berdiri diatas paham pragmatis.

Bagi seorang pragmatisme, pertanyaan mengenai apakah pengetahuan yang sejati itu tidak dapat diselidiki kebenarannya. Seperti yang telah dijabarkan pada bab dua, pragmatisme menekankan bahwa validitas kebenaran dari suatu proposisi (pengetahuan) terletak pada konsekuensi yang dihasilkannya (*consequences as a test of the validity of propositions*). Makna pengetahuan digantungkan pada konsekuensi praktis yang diakibatkannya. Dengan demikian pengetahuan dalam paham pragmatis tidak dapat dikenakan secara universal dan absolut. Diletakkannya validitas kebenaran pada nilai guna bagi kepentingan tiap individu dan bukan pada objektivitas serta korespondensialitas kemudian menggeser logika formal dari posisi dominannya dalam kaidah berpikir. Ide atau pengetahuan yang dihasilkan oleh pragmatisme kemudian diposisikan sebagai instrumen dalam bertindak.

Oleh sebab itu, bagi seorang pragmatis, pertanyaan mengenai apakah pengetahuan yang sejati tidaklah perlu untuk ditelusuri dan bahkan hanya akan berdampak pada pengikisan sisi alamiah kemanusiaan yang bersifat kontingen dan plural. Pragmatisme Dewey banyak dipengaruhi oleh Pierce, seorang filsuf dan ahli logika dari Amerika yang membuahkan pemikiran tentang semiologi atau ilmu tentang tanda. Dalam teori semiologinya Pierce menjabarkan bahwa model tanda bersifat trikotomis atau triadik dan sama sekali tidak memiliki ciri struktural (Hoed, 2002, p. 21).

Melalui proses triadik tanda, Pierce mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dihasilkan melalui gerak rasio kognitif memiliki latar kultural dan biologis karena dalam makna tanda terangkul *both "natural" and "conventional" signs of all kind* (Cobley, 1997, p. 36). Seperti yang telah dijabarkan pada bab tiga, dapat dikatakan jika Dewey menafsirkan pemikiran mengenai pola pemaknaan tanda Pierce ini sebagai *pengalaman*. Sisi alamiah kemanusiaan yang kontingen dan plural dirumuskan Dewey ke dalam pengalaman. Pengalaman dipahami sebagai keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi manusia, sebagai organisme yang terus tumbuh dengan lingkungan sekitarnya yang juga terus berubah (Rasyid, 2007, p. 96).

Pengalaman merupakan wadah bagi kemampuan intelektual untuk melakukan upaya refleksi atas berbagai elemen dan faktor yang membentuk pengalaman. Pendidikan bagi Dewey merupakan upaya praksis yang sistematis dan terarah dalam proses pengembangan pengalaman yang dimungkinkan oleh individu sebagai anggota sosial. Oleh sebab itu Dewey kemudian menekankan bahwa titik tolak dan tujuan dari pendidikan adalah pengembangan pengalaman secara berkelanjutan.

Lalu, bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Gagasan apakah yang menjadi dasar epistemologis dalam pendidikannya? Penulis menemukan beberapa kesulitan dalam meneliti permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama adalah perihal landasan hukumnya. Blunder yang muncul di wilayah landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, memperlihatkan bahwa acuan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini tidak merepresentasikan apapun selain permasalahan intern bidang kajian hukum itu sendiri. Maka seperti yang telah dijabarkan dalam bab empat, karena penyelenggaraan UN saat ini dipraktikkan sebagai standar kompetensi guru dan kelulusan siswa —dengan mengesampingkan landasan hukumnya, maka UN dapat merepresentasikan tujuan, prinsip, metode, landasan ideologis, relasi kuasa, pola komunikasi, serta kerangka epistemologis (unsur-unsur pendidikan) yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dalam skala nasional.

Mengulang analisa yang dihasilkan dari kajian penyelenggaraan UN pada bab empat, UN dijabarkan sebagai representasi dari pelaksanaan sistem pendidikan yang berlandaskan paradigma positivistik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

(1) Tipe soal dalam UN yang berupa pilihan ganda —dimana hanya terdapat satu jawaban yang benar—merupakan wujud dari *asumsi adanya kebenaran korespondensial dan universal*. Yaitu bahwa hanya ada satu wujud pengetahuan yang bernilai valid, mengacu pada realitas yang sebenarnya, dan berlaku secara general.

(2) Keyakinan akan adanya satu bentuk pengetahuan yang pasti dan bersifat universal merupakan *pengkonstruksian realitas dalam narasi positivistik*. Yaitu narasi yang memandang realitas sebagai fenomena yang teratur, terukur, dan pasti, karena tunduk pada hukum-hukum alam. Hal ini terlihat dari penyederhanaan standar perkembangan diri ke dalam penilaian kuantitatif. Perkembangan diri dianggap sebagai suatu kondisi yang teratur dan pasti sehingga dapat disederhanakan dalam kategori-kategori numeral.

(3) Penilaian kuantitatif merupakan upaya *mengkomunikasikan pengetahuan melalui bahasa universal*, yaitu melalui bahasa matematis. Ini merupakan upaya paradigma positifisme logis dalam memperoleh pengetahuan yang objektif dan universal dengan menyusun dan menggunakan struktur bahasa yang mampu merumuskan semua ungkapan ilmu pengetahuan ke dalam simbol-simbol universal.

Melalui konsepsi pendidikan Demokratis John Dewey, pertanyaan yang dapat dilontarkan kepada pendidikan yang berlandaskan gagasan-gagasan positivistik adalah, dimana posisi pengalaman dalam pendidikan? Pengalaman yang diposisikan sebagai sumber pengetahuan merupakan bentuk naturalisasi epistemologi. Naturalisme adalah paham yang menyatakan bahwa realitas yang ada hanyalah realitas yang dapat dipahami, yaitu realitas yang bersifat fisik (Rasyid, 2007, p. 161). Naturalisasi epistemologi merupakan penolakan terhadap fundasionalisasi epistemologi dengan menyatakan bahwa manusia dan lingkungannya bersifat kontingen dan oleh karena itu pengetahuan tidak akan pernah mencapai totalitasnya. Metode pencapaian pengetahuan tidak didasarkan pada suatu pendasaran yang valid atau menolak kebakuan epistemologi, namun mengacu pada pengalaman tiap individu yang secara alamiah bersifat kontingen.

Oleh sebab itu, konsepsi pendidikan demokratis John Dewey yang memposisikan pengalaman, yang dipahami sebagai keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta bersegi banyak dari interaksi manusia, sebagai organisme yang

terus tumbuh dengan lingkungan sekitarnya yang juga terus berubah, sebagai titik tolak dan tujuan dari pendidikan menolak penyelenggaraan UN karena membakukan epistemologi positivistik sebagai satu-satunya metode pencapaian pengetahuan yang dianggap valid.

## 5.2. Saran

*“Such a society must have a type of education which gives individuals a personal interest in social relationships and control, and the habits of mind which secure social changes without introducing disorder”*. (Dewey, 1916, p. 97)

Pendidikan merupakan instrumen kunci dalam pergerakan peradaban. Karena dalam pendidikan, rangkaian hasrat atas pengetahuan mengenai kehidupan manusia tertuang dan terangkai. Rangkaian ini lantas saling menjalin sepanjang peradaban dan mengarahkan arah roda kehidupan kemanusiaan. Ini merupakan jalinan atas hasil refleksi pengalaman manusia yang kompleks dan bersifat kontingen.

Kontingensi adalah sifat alamiah manusia dan lingkungan sebagai organ hidup. Karena perbedaan tegas antara benda hidup dan benda mati adalah kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Terlebih lagi, perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lainnya adalah kemampuannya untuk berfikir refleksif. Penolakan terhadap kontingensi adalah penolakan terhadap kehidupan. Penolakan terhadap kemampuan berfikir refleksif adalah penolakan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, pergerakan peradaban membutuhkan daya hidup yang berkelanjutan dan sampai pada tingkatan individual. Oleh sebab itu perbincangan mengenai pendidikan akan berlangsung sepanjang zaman.

Dewey adalah salah satu pemikir yang secara aktif melibatkan diri dalam perbincangan pendidikan. Gerak pendidikan dinilainya telah terdistorsi oleh berbagai kepentingan. Tujuannya tidak diarahkan pada pergerakan peradaban namun pemapanan ideologi yang memberi keuntungan pada segelintir pihak. Kepentingan

tiap individu agar mampu mengembangkan pengalamannya demi kesiapan menghadapi segala kondisi hidupnya yang notabene bersifat kontingen pun terabaikan.

Konflik dalam pendidikan memang selalu muncul ketika harus memutuskan apakah pendidikan selayaknya ditujukan untuk kepentingan sosial atau perkembangan diri individu semata. Namun, Dewey dengan tegas menyatakan pendidikan bukanlah instrumen untuk mengeksploitasi sosial seperti yang terlihat dalam penyelenggaraan UN, namun sebagai media yang memungkinkan individu menempatkan dirinya dalam sosial melalui pengolahan pengalaman kedirian yang berkelanjutan. Karena pendidikan dibutuhkan sebagai pendorong upaya pembentukan individualitas yang sanggup menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya serta pembentukan karakter sosial yang membuka lebar kesempatan menyuarakan pendapat. Sehingga peradaban dapat bergerak dalam jalur kemanusiaan

Konsep demokratis dalam pendidikan yang diusung oleh Dewey menjadi konsep pendidikan yang dibutuhkan untuk menata sosial agar sistemnya berjalan dalam kerangka nilai dan pemahaman yang demokratis. Pendidikan demokratis menekankan cakupan pengembangan maksimal potensi kemanusiaan baik dalam tataran intelektual dan emosional. Konsep ini merombak tatanan ide-ide tradisional dalam praktek belajar mengajar, dimana siswa ditempatkan sebagai objek yang secara pasif menerima informasi dan materi belajar. Metode pembelajarannya dekat pedagogi pendidikan kritis. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem-problem sosial secara bebas dan kritis. Sehingga tiap individu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik negaranya dan mampu menciptakan peluang untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam sosial. Dengan demikian, pendidikan ditempatkan sebagai arena perjuangan politik. Paradigma pendidikan kritis menghendaki perubahan struktur politik, sosial, dan ekonomi secara fundamental dimana pendidikan tersebut diselenggarakan. Pendidikan diakui tidak dapat bersikap

netral, objektif, serta berjarak dengan realitas sosial seperti yang dicanangkan oleh paradigma pendidikan liberal.

Pendidikan demokratis merupakan pengaplikasian prinsip-prinsip demokrasi sebagai pondasi penyelenggaraan pendidikannya. Pengaplikasian ini mencakup pondasi tujuan, epistemologi, nilai moral, serta pola relasi kuasa antar individu dalam penyelenggaraan pendidikan. Dewey, dalam *Democracy and Education* membicarakan bagaimana penyelenggaraan pendidikan harus berjalan dalam kerangka tujuan pendidikan tertentu. Tujuan dapat dipahami sebagai tinjauan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai.

Oleh sebab itu, ide yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan harus mempersilahkan dan memberi kemampuan untuk melakukan tinjauan mengenai kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Karena hal ini akan memberikan kesempatan tiap peserta dan penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengobservasi kondisi-kondisi alamiah yang mencakup potensi maupun hambatan dalam menggapai hasil yang dituju, merangkai tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan, serta memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan alternatif ketika tindakan yang dilakukan tidak mengarah pada hasil yang dituju.

Dewey menekankan bahwa pihak yang memiliki kemampuan ini adalah murid, guru, orang tua, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka akan terdapat keberagaman dan perubahan arah tujuan seiring pertumbuhan pengalaman tiap individunya. Oleh karena itu, menjadi ganjil ketika tujuan salah satu pelaku pendidikan dirumuskan menjadi keseluruhan tujuan dalam pendidikan tersebut.

Dengan demikian, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik yang memperlihatkan nilai-nilai demokratis dalam menentukan tujuan pendidikan yaitu dengan melakukan observasi atas potensi dan kebutuhan diri anak didik dalam menentukan tujuan pendidikannya.

Oleh sebab itu:

1. UN sudah selayaknya tidak diposisikan sebagai patokan kelulusan atau bahkan patokan kompetensi siswa, guru, dan sekolah, namun hanya sebagai alat pemetaan mutu pendidikan. Hasil dari UN dapat dijadikan data acuan bagi upaya-upaya pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan —sesuai dengan PP No 19/2005 pasal 68 butir d.
2. keberagaman potensi dan perbedaan kebutuhan setiap peserta didik menyebabkan penilaian prestasi dalam pendidikan tidak dapat semata-mata mengacu pada hasil evaluasi yang bersifat general, tetapi juga kriteria penilaian yang bersifat individual.
3. evaluasi dalam pendidikan tidak hanya ditujukan kepada siswa terhadap juga terhadap kinerja pendidik, sekolah, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan ini, ruang dialog antara kebutuhan peserta didik dengan keseluruhan unsur dalam sistem pengajaran yang diterapkan sekolahnya akan terbuka.

Akhir kata, semoga kajian dalam skripsi ini dapat memberi dukungan kecil dalam upaya penyelenggaraan pendidikan demokratis demi kemanusiaan yang lebih baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Budianto, Irmayanti M. (2002). *Realitas dan objektivitas: Refleksi kritis atas cara kerja ilmiah*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Dewey, John. (1916). *Democracy and education*. New York: Macmillan.
- \_\_\_\_\_. (1922). *My pedagogyc creed*. New York: Henry Holt and Company.
- \_\_\_\_\_. (1938). *Experience and education*. New York: Touchstone Rockefeller Center.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Depdiknas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Antologi artikel 2005-2006*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Departement Pendidikan Nasional.
- Fromm, Erich. (1997). *Lari dari kebebasan* (Kamdani, Penerjemah.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Dari pembangkangan menuju sosialisme humanistik* (Bambang Murtianto, Penerjemah.). Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Hadiwijono, Harun. (1980). *Sari sejarah filsafat barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- John, G. Kemeny. (1959), *A philosophy looks at science*. Netherland: Van Nostrand.
- Kattsoff, Louis O. (2004). *Pengantar filsafat* (Soejono Soemargono, Penerjemah.). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- M.S., Kaelan. (1998). *Filsafat bahasa: Masalah dan perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Naomi, Omi Intan. (Ed.). (1999). *Menggugat pendidikan: Fundamentalis, konservatif, liberal, anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricouer, Paul. (2002). *Filsafat wacana: Membelah makna dalam anatomi bahasa* (Musnur Hery, Penerjemah.). Yogyakarta: Ircisod.
- Samuel, E. Stumpf, (1983). *Philosophy: History and problems*. New York: McGraw-Hill Book Company.

- Suriasumantri, Jujun. S. (Ed.). (1978). *Ilmu dalam perspektif*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyitno, Y.. (2009). *Landasan filosofis pendidikan*. Jakarta: Depdiknas. Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- UU Sisdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Agustus 19, 2010.
- Wingo, G. Max. (1975). *Philosophies of education an introduction*. New Delhi: Sterling Publisher.
- Yusuf, Achyar. (2010). *Positivisme, positivism logis dan siklus empiris*. Kumpulan materi kuliah Filsafat Ilmu Politik FIB UI 2009-2010 (Tidak diterbitkan).

## **ARTIKEL**

- Haryatmoko. (2002). Kekuasaan melahirkan anti-kekuasaan. *Jurnal Basis*, 51, 8-21.
- Kwartolo, Yuli. (2002). Catatan kritis tentang kurikulum berbasis kompetensi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 01, 106-116.
- Rifki, Muhammad. (2009). Membangun keindonesiaan sebagai pengalaman kebangsaan yang menyejarah. *Jurnal Kohesi: Redefinisi identitas Indonesia melalui kajian budaya*, 1, 25-36.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Positivisme: *Paradigma ke arah lahirnya teori-teori sosial*. February 1, 2011.
- Wisudo, Bambang. (2010). Melawan pendidikan hegemonik dan rezim testing dalam persekolahan. *Jurnal Perempuan*, 66, 19-30.

## **SKRIPSI**

Rasyid, Abdul M.. (2007). *Relasi individu dan sosial dalam filsafat pendidikan John Dewey*. Skripsi Program Studi Filsafat FIB UI (Tidak diterbitkan).

